

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI SULAWESI UTARA 2014



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI SULAWESI UTARA 2014



<http://sulut.bps.go.id>

**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
SULAWESI UTARA**
WELFARE INDICATORS OF SULAWESI UTARA
2014

ISBN

Nomor Publikasi 71522.1529
Katalog BPS 4102004.71
Ukuran Buku 21 X 29,7 cm
Jumlah Halaman vi + 63 halaman

Naskah

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Sulawesi Utara

Gambar Kulit

Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik BPS Provinsi Sulawesi Utara

Penyunting

Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik BPS Provinsi Sulawesi Utara

Diterbitkan oleh

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara

“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau mengandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik”

KATA PENGANTAR

Program pemerintah pada hakekatnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Karena masyarakat adalah subjek sekaligus menjadi objek pembangunan. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Untuk melihat seberapa jauh pencapaian program pembangunan dalam wacana kesejahteraan rakyat, maka BPS Provinsi Sulawesi Utara sebagai penyedia data, menerbitkan publikasi berjudul **Indikator Kesejahteraan Rakyat Sulawesi Utara 2014**.

Publikasi ini merupakan publikasi tahunan BPS Provinsi Sulawesi Utara yang menyajikan data tentang tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat di Provinsi Sulawesi Utara antar waktu, dan melihat perbandingan antar kabupaten/kota. Data untuk analisis indikator kesejahteraan rakyat bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2014. Data ketenagakerjaan tidak ditampilkan dalam publikasi tahun ini karena sudah ditampilkan dalam publikasi khusus ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Sulawesi Utara.

Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mewujudkan publikasi ini, disampaikan terima kasih.

Manado, Oktober 2015
Kepala,

Faizal Anwar

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
I. KEPENDUDUKAN	1
1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	1
1.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk	3
1.3 Struktur Umur dan Beban Ketergantungan	5
1.4 Fertilitas	7
II. KESEHATAN	10
2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk	10
2.2 Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan	11
III. PENDIDIKAN	17
3.1 Tingkat Pendidikan	18
3.2 Tingkat Partisipasi Sekolah, Partisipasi Kasar, dan Partisipasi Murni	21
IV. TARAF DAN POLA KONSUMSI	24
4.1 Perkembangan Kemiskinan	24
4.2 Perkembangan Tingkat Kesejahteraan	26
4.3 Pengeluaran Rumah Tangga	26
V. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN	28
5.1 Kualitas Rumah Tinggal	29
LAMPIRAN	34

DAFTAR TABEL

Halaman

KEPENDUDUKAN

1.1	Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Utara	2
1.2	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Sulawesi Utara Menurut Kabupaten/Kota, 2014	4
1.3	Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Sulawesi Utara, 2008 – 2014	5

KESEHATAN

2.1	Rata-rata Lama Sakit per Kabupaten/Kota Sulawesi Utara, 2012 – 2014	11
2.2	Persentase Penolong Persalinan Pertama Bayi, 2012 – 2014	13
2.3	Persentase Penolong Persalinan Pertama Bayi menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2014	14
2.4	Persentase Penduduk yang Berobat Sendiri menurut Jenis Pengobatan yang Digunakan menurut Kabupaten/Kota, 2013 – 2014	15
2.5	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Tempat Berobat, 2012 – 2014	16

PENDIDIKAN

3.1	Angka Melek Huruf menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2014	18
3.2	Persentase Penduduk 10 tahun ke atas menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, 2014	20
3.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Usia Sekolah, 2014	21
3.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan, 2014	22
3.5	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan, 2014	22

TARAF DAN POLA KONSUMSI

4.1	Perkembangan Kemiskinan, 2013-2014	25
4.2	Pengeluaran per Kapita per Bulan, 2012-2014	26
4.3	Pengeluaran Rata-rata Nominal dan Persentase Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan selama Sebulan, 2013-2014	27

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

5.1	Persentase Rumahtangga menurut Indikator Kualitas dan Fasilitas Perumahan di Sulawesi Utara, 2013 – 2014	30
-----	--	----

DAFTAR GAMBAR

	Halaman	
1	Persentase Luas Daerah Kota dan Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara, 2014	3
2	Angka Beban Ketergantungan Sulawesi Utara, 2008 – 2014	6
3	Periode <i>Windows of Opportunity</i> Nasional yang Terjadi pada Periode 2010-2045	7
4	Rata-rata Umur Perkawinan Pertama Wanita Berumur 10 Tahun Ke Atas Sulawesi Utara, 2014	8
5	Persentase Penolong Persalinan Pertama Bayi di Sulawesi Utara, 2014	12
6	Angka Buta Huruf menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2014	19
7	Persentase Rumahtangga yang Menempati Rumah Sendiri di Provinsi Sulawesi Utara, 2014	28
8	Persentase Rumahtangga dengan Luas Lantai Rumah < 20 m ² per Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2014	31
9	Persentase Rumahtangga yang Berlantai Tanah per Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2014	32
10	Persentase Fasilitas Tempat Buang Air Besar Rumahtangga di Sulawesi Utara, 2014	33

I. KEPENDUDUKAN

Masalah kependudukan meliputi jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan bila kualitasnya baik, namun sebaliknya dapat menjadi beban pembangunan bila kualitasnya rendah. Seperti diketahui bersama bahwa hampir semua rencana pembangunan perlu ditunjang dengan data jumlah penduduk, persebaran dan susunannya menurut kelompok umur penduduk yang relevan dengan rencana tersebut. Oleh sebab itu untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional, dalam menangani permasalahan penduduk pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk tapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Disamping itu program perencanaan pembangunan sosial di segala bidang harus mendapat prioritas utama yang berguna untuk peningkatan kesejahteraan penduduk.

1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk berkaitan erat dengan laju pertumbuhan penduduk. Semakin tingginya rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun, otomatis akan meningkatkan jumlah penduduk secara pesat. Tingkat pertumbuhan yang tinggi pada tingkat ekonomi suatu daerah yang belum maju, dapat menimbulkan permasalahan. Pertumbuhan penduduk tinggi yang disumbangkan oleh penambahan jumlah penduduk usia muda yang belum produktif menjadi beban perekonomian secara makro dan menjadi beban rumahtangga secara mikro. Sedangkan pertumbuhan penduduk tinggi yang disumbangkan oleh penambahan jumlah penduduk usia muda yang produktif biasanya karena faktor banyaknya migrasi pencari kerja yang masuk juga tentu akan menimbulkan masalah sosial baru di suatu daerah.

Pada tahun 2014 jumlah penduduk Sulawesi Utara mencapai 2,387 juta jiwa. Meskipun dari tahun 1990 hingga 2010, secara absolut, jumlah penduduk terus bertambah namun laju pertumbuhannya relatif mengalami penurunan. Penurunan laju pertumbuhan penduduk mengindikasikan keberhasilan program Keluarga Berencana dimana program ini di Indonesia ditujukan untuk menekan angka kelahiran, menciptakan norma keluarga kecil sehingga terbuka peluang bagi suatu keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarganya.

Dengan jumlah penduduk yang relatif besar, permasalahan kependudukan di Sulawesi Utara perlu mendapat perhatian yang serius. Oleh karena itu, upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk disertai dengan peningkatan kesejahteraan penduduk harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan bersinergi dengan program-program pembangunan lainnya yang sedang dan akan dilaksanakan.

Tabel 1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Sulawesi Utara

Tahun	Jumlah Penduduk (juta)	Laju pertumbuhan
(1)	(2)	(3)
1990	1,762	1,33 (1990-2000)
2000	2,001	1,25 (2000-2005)
2005	2,129	1,28 (2000-2010)
2010	2,270	

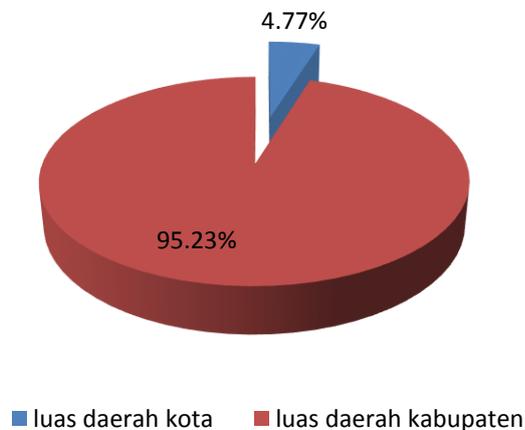
Sumber : Sensus Penduduk 1990, 2000, 2010, dan Supas 2005

Sejak periode 1990-2000 laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Utara sudah dibawah 2 persen, tergolong cukup kecil dibandingkan daerah lain atau rata-rata nasional. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia pada periode 2000-2010 sebesar 1,49 persen per tahun, sedangkan laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Utara pada periode yang sama 1,28 persen. Secara absolut, jumlah penduduk Sulawesi Utara mengalami peningkatan dari tahun 1990 sampai tahun 2010, yaitu sebesar 0,508 juta penduduk. Tetapi laju pertumbuhannya mengalami penurunan sebesar 0,05 persen.

Jumlah penduduk tercatat sebanyak 2,001 juta jiwa pada tahun 2000 dan meningkat menjadi 2,129 juta jiwa pada tahun 2005. Lima tahun kemudian jumlah penduduk Sulawesi Utara sebanyak 2,270 juta jiwa, dan di tahun 2014 mencapai 2,387 juta jiwa. Masalah kependudukan bisa menjadi masalah yang serius bagi suatu daerah jika tidak dimbangi dengan pembangunan yang terintegrasi. Oleh karena itu, upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk disertai dengan upaya peningkatan kesejahteraan penduduk harus merupakan suatu upaya yang berkesinambungan dengan program pembangunan yang sedang dan akan terus dilaksanakan.

1.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Gambar 1. Persentase luas daerah kota dan kabupaten Provinsi Sulawesi Utara, 2014



Persebaran penduduk antara kabupaten dan kota tampak masih timpang, sehingga kepadatannya masih belum merata. Kepadatan penduduk biasanya terpusat di daerah perkotaan yang umumnya memiliki segala fasilitas yang dibutuhkan oleh penduduk sehingga mengundang penduduk wilayah kabupaten untuk bekerja atau bertempat tinggal di daerah kota. Hal ini juga terjadi di Provinsi Sulawesi Utara, dimana persebaran penduduk dari tahun ke tahun masih terkonsentrasi di perkotaan. Dengan luas hanya 4,77 persen dari seluruh luas wilayah daratan Sulawesi Utara, daerah kota dihuni oleh sekitar 35,25 persen penduduk Sulawesi Utara. 4 Daerah Kota di Sulawesi Utara menempati 4 teratas Kabupaten/Kota yang penduduknya terpadat. Daerah yang terpadat penduduknya adalah Kota Manado, dimana setiap Km^2 dihuni sekitar 2.536 jiwa. Terpadat kedua adalah Kota Kotamobagu, yaitu setiap Km^2 dihuni sekitar 2.392 jiwa. Sementara daerah yang paling jarang penduduknya adalah Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Utara, dimana di kedua kabupaten tersebut setiap Km^2 wilayahnya dihuni kurang dari 40 orang.

Tabel 1.2. Luas Wilayah, jumlah penduduk dan Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/ Kota, 2014

Kode	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk per Km ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Bolaang Mongondow	3.021,60	229.604	75,99
02	Minahasa	1.188,69	325.680	273,98
03	Kep. Sangihe	597,13	129.103	216,21
04	Kep. Talaud	1.014,74	87.922	86,64
05	Minahasa Selatan	1.478,47	203.317	137,52
06	Minahasa Utara	985,24	196.419	199,36
07	Bolaang Mongondow Utara	1.935,53	75.290	38,90
08	Kep. Siau Tagulandang Biaro	218,18	65.284	299,22
09	Minahasa Tenggara	709,28	103.818	146,37
10	Bolaang Mongondow Selatan	1.798,29	61.177	34,02
11	Bolaaang Mongondow Timur	904,16	67.824	75,01
71	Manado	166,87	423.257	2.536,45
72	Bitung	330,17	202.204	612,42
73	Tomohon	147,11	98.686	670,83
74	Kotamobagu	48,91	117.019	2.392,54
Sulawesi Utara		14.544,37	2.386.604	164,09

Sumber: Sulawesi Utara dalam Angka 2014

Masalah yang sering timbul yang diakibatkan oleh kepadatan penduduk adalah masalah perumahan, kesehatan, dan keamanan. Oleh karena itu, distribusi penduduk harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, setidaknya pembangunan yang dilaksanakan di daerah-daerah perkotaan harus berkaitan dengan daya dukung lingkungan dan dapat menciptakan lapangan kerja yang luas bagi penduduk setempat.

1.3. Struktur Umur dan Beban Ketergantungan

Tabel 1.3 menunjukkan komposisi penduduk Sulawesi Utara menurut tiga kelompok umur yakni kelompok umur produktif (15-64 tahun), kelompok umur belum produktif muda (0-14 tahun) dan tidak produktif lanjut usia (65 tahun ke atas). Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2014, Sulawesi Utara memiliki penduduk usia muda sekitar 26,05 persen, penduduk usia produktif 68,15 persen, dan penduduk usia lanjut 5,80 persen. Selama periode 2011-2014 telah terjadi peningkatan komposisi penduduk usia lanjut, dan dikenal dengan istilah proses penuaan (*aging process*) atau proses transisi umur dari penduduk muda ke penduduk tua, dan selama periode 2008-2011 terjadi penurunan jumlah penduduk usia lanjut, penambahan proporsi penduduk usia muda dan penambahan proporsi penduduk usia produktif.

Tabel 1.3 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan Di Sulawesi Utara, 2008-2014

Tahun	0 – 14	15 – 64	65 +	Angka Beban Ketergantungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2008	27,40	66,34	6,27	50,75
2009	27,47	66,28	6,25	50,88
2010	27,46	66,53	6,01	50,32
2011	28,35	68,04	5,53	51,24
2012	27,54	66,84	5,62	49,61
2013	26,27	68,05	5,68	46,96
2014	26,05	68,15	5,80	46,72

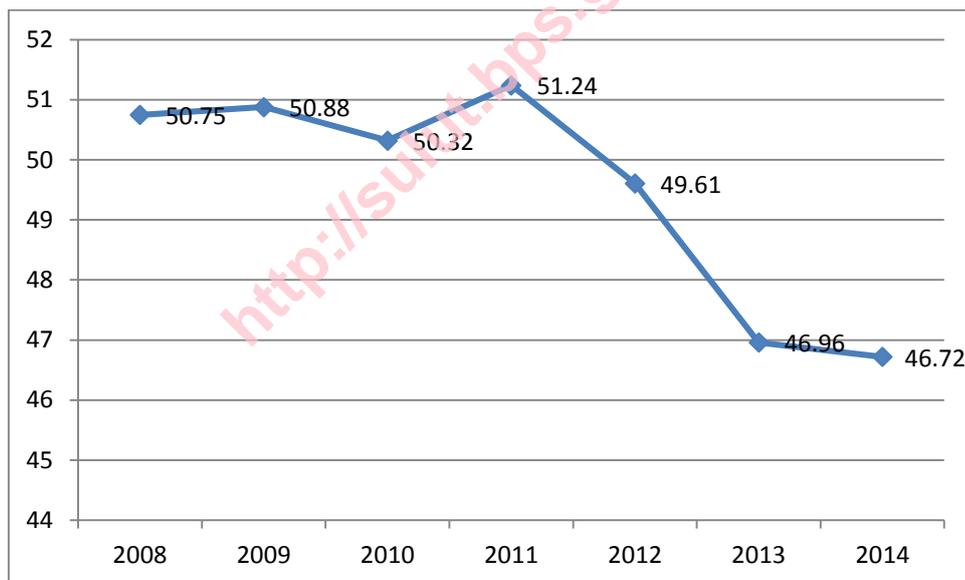
Sumber : Susenas

Struktur umur penduduk Sulawesi Utara berada pada tahap transisi antara penduduk muda menjadi penduduk tua. Hal ini karena proporsi penduduk mudanya (dibawah 15 tahun) kurang dari 30 persen (memenuhi kategori penduduk tua seperti

ditunjukkan pada Tabel 1.3). Di sisi lain proporsi penduduk tuanya (usia 65+) belum mencapai 6 persen (belum masuk kategori penduduk tua).

Pada tahun 2014, angka beban ketergantungan sebesar 46,72 yang berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 46 sampai 47 penduduk usia tidak produktif. Mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2013. Hal ini dapat menjadi signal yang baik untuk pemerintah setempat memaksimalkan penduduk usia kerja. Bila proporsi penduduk usia tidak produktif semakin rendah (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 tahun atau lebih) maka angka beban ketergantungan akan semakin rendah. Semakin rendah angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya dan keturunannya dengan adanya investasi *human capital* maupun *saving*.

Gambar 2. Angka Beban Ketergantungan Tahun 2008-2014

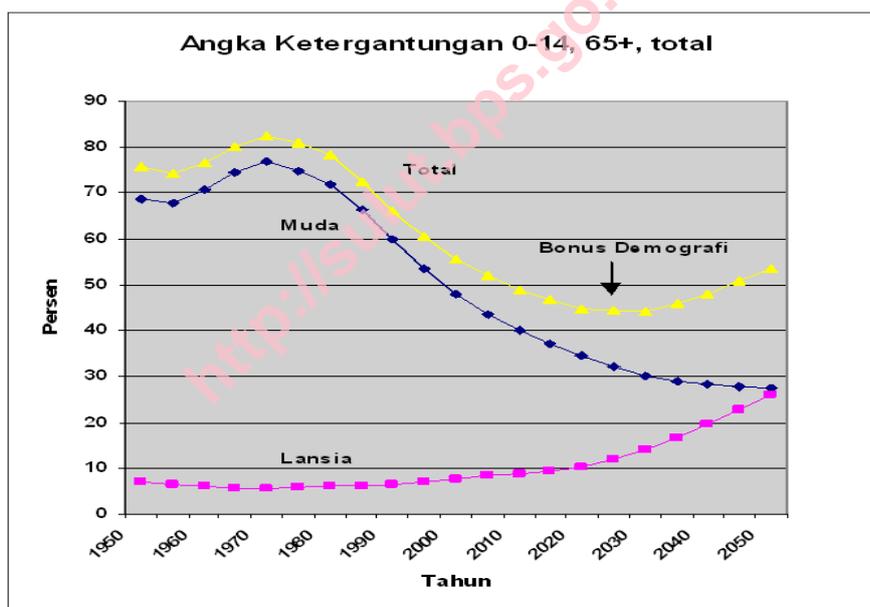


Tren angka beban ketergantungan 2008-2014 Sulawesi Utara terlihat ke arah penurunan dari 50,75 di tahun 2008 menjadi 46,72 di tahun 2014. Dari tahun 2008-2011, angka beban ketergantungan fluktuatif. Namun, mulai tahun 2012 hingga 2014 terjadi penurunan yang relatif besar.

Angka beban ketergantungan di bawah 50 merupakan indikasi bahwa suatu daerah masih berada pada periode jendela peluang (*windows of opportunity*). Pada periode pendek tersebut diperoleh adanya bonus demografi yakni keuntungan ekonomis akibat adanya peningkatan proporsi penduduk usia produktif sehingga

setiap 100 penduduk usia produktif hanya menanggung 50 penduduk usia tidak produktif atau perbandingannya hanya setengahnya. Ilustrasinya, pada suatu rumahtangga setiap 2 anggota rumahtangga usia produktif (misalnya ayah dan ibu) terdapat satu anggota rumahtangga yang tidak produktif, anak dibawah 15 tahun misalnya. Bayangkan jika terdapat kesempatan kerja yang juga cukup untuk menampung mereka, maka akan terjadi kelebihan kemampuan memenuhi kebutuhannya sehingga ada kemampuan bagi rumah tangga untuk melakukan *saving* atau melakukan investasi *human capital* yang lebih tinggi baik bagi kedua orang tua pada ilustrasi tadi ataupun bagi anaknya. Investasi *human capital* misalnya dengan menyekolahkan pada jenjang yang lebih tinggi, ataupun meningkatkan kemampuan tambahan misalnya melalui kursus dan lain-lain.

Gambar 3. Periode Windows of Opportunity Nasional yang Terjadi pada Periode 2010-2045

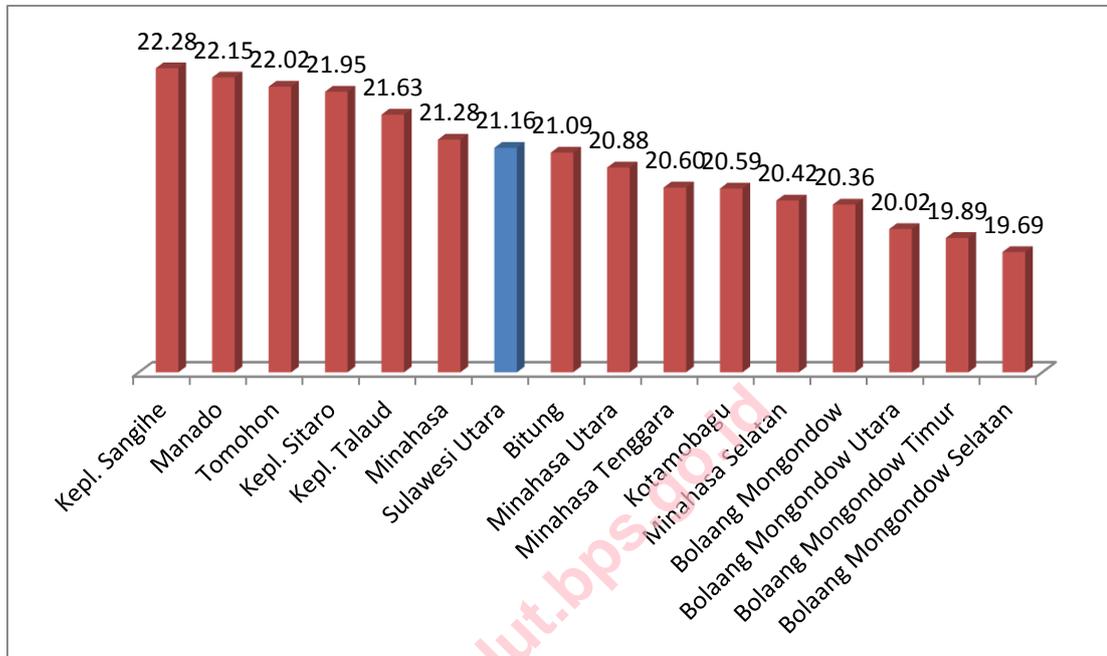


1.4. Fertilitas

Laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh tiga faktor demografi, yaitu tingkat kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan (migrasi). Perpindahan atau migrasi dibagi menjadi migrasi masuk dan migrasi keluar. Tingkat fertilitas merupakan faktor demografi yang menentukan penurunan tingkat pertumbuhan penduduk. Program KB dan penundaan usia perkawinan pada wanita

merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat fertilitas, karena memperpendek masa reproduksi mereka.

Gambar 4. Rata-rata Umur Perkawinan Pertama Wanita Berumur 10 Tahun Ke Atas di Sulawesi Utara, 2014



Usia perkawinan pertama seorang wanita berpengaruh terhadap resiko melahirkan. Semakin muda usia perkawinan pertama, semakin besar resiko yang dihadapi selama masa kehamilan/melahirkan, baik keselamatan ibu maupun anak, karena belum matangnya rahim wanita muda untuk proses berkembangnya janin atau karena belum siapnya mental menghadapi masa kehamilan/kelahiran. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2014, rata-rata umur perkawinan pertama seorang wanita di Sulawesi Utara adalah 21,16 tahun. Umur perkawinan pertama seorang wanita yang terendah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur yaitu di umur 19,69 tahun dan 19,89 tahun. Perkawinan di bawah 20 tahun secara kesehatan reproduksi bisa dikatakan masih terlalu muda, secara mental sosial belum siap dan secara ekonomi juga biasanya belum mapan. Semakin muda usia kawin pertama yang dilakukan seseorang, maka akan semakin lama pula masa reproduksinya. Hal ini berpengaruh pada tingkat fertilitas wanita dan penduduk secara umumnya. Semakin lama masa reproduksi wanita, maka kemungkinan wanita tersebut melahirkan banyak anak akan semakin besar. Dalam persoalan makro, hal ini akan

menyebabkan meningkatnya tingkat pertumbuhan penduduk suatu daerah. Di Kabupaten Kepl. Sangihe dan Kota Manado rata-rata umur perkawinan pertama seorang wanita relatif lebih tinggi dibanding kabupaten/kota lainnya, yaitu umur 22,28 tahun di Kabupaten Kepl. Sangihe dan 22,15 tahun di Kota Manado. Hal ini menarik mengingat Kabupaten Kepl. Sangihe merupakan daerah kepulauan tetapi tingkat kesadaran masyarakat terkait usia perkawinan pertama cukup tinggi. Sedangkan Kota Bitung dan Kota Kotamobagu rata-rata usia perkawinan pertamanya berada di bawah rata-rata provinsi. Penundaan usia kawin pertama akan mempercepat penurunan tingkat kelahiran, mengurangi masa reproduksi perempuan, dan memberikan perubahan mendasar pada pendidikan, struktur ekonomi dan keluarga, dan seorang wanita akan memiliki kesempatan yang lebih besar dalam mengaktualisasikan potensi diri dalam pekerjaan, lembaga pemerintahan, dll.

<http://sulut.bps.go.id>

2. KESEHATAN

Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Salah satu aspek penting yang turut mempengaruhi kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan antara lain diukur melalui angka kesakitan dan status gizi. Sementara untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan dan jenis pengobatan yang dilakukan. Oleh karena itu usaha untuk meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat perlu mendapat perhatian utama.

2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk adalah rata-rata lama sakit atau lamanya terganggu aktifitas sehari-hari. Semakin kecil rata-rata lama sakit berarti semakin baik penanganan keluhan kesehatan di suatu daerah. Di Sulawesi Utara rata-rata lamanya seseorang terganggu karena sakitnya mengalami kenaikan dari tahun 2012 ke tahun 2013, yaitu dari 5,41 hari menjadi 5,93 hari. Bila dilihat per kabupaten/kota, Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki rata-rata lama sakit terpendek yaitu 4,92 hari. Sedangkan yang memiliki rata-rata lama sakit terpanjang adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yaitu 7,00. Hal yang menarik kembali disajikan, di tengah keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan di daerah kepulauan, proses *recovery* dari keluhan kesehatan lebih cepat di banding daerah yang ada di daratan.

**Tabel 2.1 Rata-rata Lama Sakit per Kabupaten/ Kota
di Sulawesi Utara, 2012-2014**

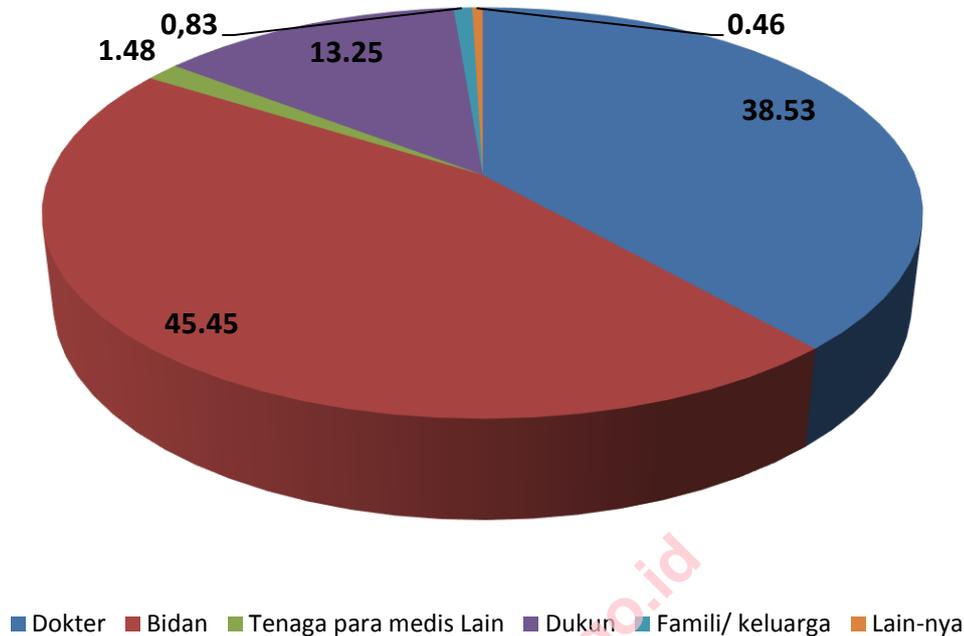
Kabupaten/Kota	Rata – rata Lama Sakit		
	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
Bolaang Mongondow	4,42	5,86	6,02
Minahasa	6,17	6,72	5,91
Kep. Sangihe	5,45	5,14	5,12
Kep. Talaud	4,37	4,55	4,92
Minahasa Selatan	5,61	6,93	6,41
Minahasa Utara	5,68	5,79	6,28
Bolaang Mongondow Utara	4,82	5,45	7,00
Kep. Siau Tagulandang Biaro	7,14	5,70	6,36
Minahasa Tenggara	5,35	6,16	5,17
Bolaang Mongondow Selatan	5,41	5,10	6,04
Bolaang Mongondow Timur	4,21	5,22	5,50
Manado	5,29	6,34	6,13
Bitung	5,96	5,28	5,74
Tomohon	5,08	5,21	5,22
Kotamobagu	4,72	5,49	5,13
Sulawesi Utara	5,41	5,93	5,90

Sumber: Susenas

2.2 Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor penentu utama. Hal yang penting lainnya adalah ketersediaan pelayanan kesehatan reproduksi yang diupayakan agar persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang profesional (dokter, bidan dan tenaga kesehatan lainnya).

Gambar 5. Persentase Penolong Persalinan Pertama Bayi di Sulawesi Utara, 2014



Dalam hal tenaga persalinan, masyarakat Sulawesi Utara umumnya sudah memiliki preferensi untuk menggunakan tenaga kesehatan/medis. Hal ini terlihat dari Gambar 5 yang menunjukkan besarnya persentase penolong persalinan oleh tenaga medis yaitu bidan sebesar 45,45 persen, dokter sebesar 38,53 persen, dan tenaga paramedis lainnya sebesar 1,48 persen. Disamping itu, persentase kelahiran yang ditolong oleh dukun, famili/keluarga, atau lainnya juga masih tergolong relatif besar, yaitu 14,54 persen.

Persalinan pertama yang ditolong oleh tenaga terdidik dan terlatih akan meningkatkan kesehatan dan kelangsungan hidup ibu dan bayi. Peningkatan persentase penolong persalinan oleh tenaga kesehatan idealnya terus meningkat dari tahun ke tahun, karena hal tersebut terkait erat dengan kelangsungan hidup ibu dan bayi yang dilahirkannya. Persentase persalinan yang ditolong pertama kali oleh bidan merupakan yang terbesar yakni mencapai 45,45 persen (Tabel 2.2). Bidan saat ini mudah dijangkau sejak adanya program bidan desa. Di perkotaan terlebih karena setiap Puskesmas tersedia tenaga bidan. Masih banyaknya persalinan yang dilakukan oleh tenaga dukun bayi (13,25%) menunjukkan di masyarakat pedesaan pilihan bidan merupakan *trade off* dengan pilihan dukun bayi. Manakala bidan sulit didapat maka dukun merupakan pilihan lain. Terutama bagi desa-desa yang jauh dari jangkauan

puskesmas. Dengan kondisi demikian mau tidak mau eksistensi dukun bayi tetap strategis. Program pemerintah tidak mutlak hanya dengan menambah tenaga medis tetapi juga tetap diperlukan peningkatan ketrampilan dan pengetahuan kesehatan bagi dukun bayi mengingat eksistensi mereka tadi. Persalinan yang ditangani oleh dokter sudah cukup banyak yakni 38,53 persen. Banyak masyarakat perkotaan lebih memilih dokter dibanding tenaga medis lain apalagi dukun bayi. Kemudahan mendapatkan pelayanan dokter di perkotaan menjadikan masyarakat lebih memilih dokter. Bidan biasanya tersedia di rumah bersalin dan puskesmas. Rumah sakit yang ditangani oleh dokter biasanya menjadi pilihan utama bagi masyarakat perkotaan untuk melakukan proses persalinan.

Tabel 2.2 Persentase Penolong Persalinan Pertama Bayi di Sulawesi Utara, 2012-2014

Penolong Persalinan Pertama	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
Tenaga Kesehatan	80,56	82,84	85,46
Dokter	30,39	35,90	38,53
Bidan	47,73	45,88	45,45
Lainnya	2,44	1,06	1,48
Bukan tenaga kesehatan	19,44	17,16	14,54
Dukun tradisional	18,44	15,70	13,25
Family/keluarga	0,93	1,24	0,83
Lainnya	0,07	0,22	0,46

Sumber : Susenas

Bila dilihat (Tabel 2.3) menurut kabupaten/kota maka daerah-daerah seperti Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Manado, Bitung, Tomohon, Kotamobagu, Kepl. Talaud, dan Bolaang Mongondow Selatan penolong kelahiran pertamanya oleh tenaga kesehatan lebih dari 50 persen, sementara itu, Bolaang Mongondow Selatan penolong kelahiran pertamanya oleh tenaga kesehatan hanya dibawah 50 persen saja. Daerah tersebut memerlukan perhatian yang cukup serius

terutama dalam penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Tabel 2.3 Persentase Penolong Persalinan Pertama Bayi Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2014

Kabupaten/Kota	Penolong Kelahiran Pertama		Jumlah
	Tenaga Kesehatan	Bukan Tenaga Kesehatan	
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Bolaang Mongondow	74,69	25,31	100,00
02. Minahasa	96,03	3,97	100,00
03. Kep. Sangihe	90,96	9,04	100,00
04. Kep. Talaud	66,85	33,15	100,00
05. Minahasa Selatan	87,54	12,46	100,00
06. Minahasa Utara	83,19	16,81	100,00
07. Bolaang Mongondow Utara	69,42	30,58	100,00
08. Kep. Siau Tagulandang Biaro	81,10	18,90	100,00
09. Minahasa Tenggara	84,07	15,93	100,00
10. Bolaang Mongondow Selatan	50,14	49,86	100,00
11. Bolaang Mongondow Timur	59,80	40,20	100,00
71. Manado	96,43	3,57	100,00
72. Bitung	85,08	14,92	100,00
73. Tomohon	100,00	0,00	100,00
74. Kotamobagu	94,55	5,45	100,00
Sulawesi Utara	85,46	14,54	100,00

Sumber: Susenas

Penduduk yang mengalami gangguan kesehatan pada umumnya melakukan upaya pengobatan, baik dengan berobat sendiri, maupun berobat jalan. Mengobati sendiri adalah upaya seseorang yang melakukan pengobatan tanpa datang ke tempat fasilitas kesehatan maupun memanggil dokter/petugas kesehatan ke rumahnya. Ada 3 jenis pengobatan sendiri, yaitu dengan obat tradisional, obat modern dan obat lainnya

selain obat tradisional dan obat modern. Yang dimaksud dengan obat modern adalah obat yang dibeli dari warung atau apotik tanpa resep dokter.

Tabel 2.4 Persentase Penduduk yang Berobat Sendiri menurut Jenis Pengobatan yang Digunakan per Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2013-2014

Kabupaten/Kota	Jenis Obat yang Digunakan					
	Tradisional		Modern		Lainnya	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Bolaang Mongondow	14,67	15,44	95,56	92,66	4,92	2,45
02. Minahasa	10,62	7,47	88,62	95,64	3,79	1,85
03. Kep. Sangihe	38,35	28,86	78,78	83,77	0,60	0,64
04. Kep. Talaud	13,92	10,91	96,18	96,41	1,24	0,80
05. Minahasa Selatan	11,51	9,56	91,30	90,75	1,63	1,28
06. Minahasa Utara	14,03	18,51	92,97	88,40	2,79	2,25
07. Bolaang Mongondow Utara	24,56	21,86	90,57	86,10	3,82	5,79
08. Kep. Siau Tagulandang Biaro	20,57	28,06	94,50	87,24	5,56	1,13
09. Minahasa Tenggara	22,66	6,31	91,15	92,09	2,10	3,30
10. Bolaang Mongondow Selatan	34,61	8,53	93,67	95,67	4,81	4,10
11. Bolaang Mongondow Timur	17,80	16,11	93,57	89,30	6,09	4,29
71. Manado	12,60	5,75	93,65	94,94	2,32	2,60
72. Bitung	13,69	12,19	83,65	90,64	7,43	2,18
73. Tomohon	10,33	8,47	93,76	93,25	0,52	1,42
74. Kotamobagu	9,10	6,96	95,34	96,12	3,45	2,18
Sulawesi Utara	16,03	12,30	91,25	92,07	3,41	2,35

Sumber : Susenas

Pada tahun 2014, 92,07 persen penduduk Sulawesi Utara yang mengalami gangguan kesehatan mengobati sendiri penyakitnya dengan mengkonsumsi obat modern. Ini menunjukkan bahwa mengkonsumsi obat modern menjadi pilihan utama masyarakat yang berobat sendiri saat mengalami gangguan kesehatan.

Dalam hal tempat berobat bagi penduduk yang berobat jalan, yang paling menonjol pada tahun 2014 adalah penduduk yang berobat ke praktek dokter dan puskesmas/pustu yang besarnya masing-masing sekitar 33,55 persen dan 32,87 persen.

Jika diamati pada tabel 2.5., relatif banyak penduduk yang beralih menggunakan puskesmas pada tahun 2013. Terjadi peningkatan yang relatif banyak penduduk yang berobat jalan ke puskesmas/Pustu.

Tabel 2.5 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Tempat Berobat, 2012-2014

Tempat Berobat	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah Sakit			
Pemerintah	7,04	6,38	6,09
Swasta	4,50	4,43	3,27
Praktek Dokter	34,34	33,55	35,68
Puskesmas/Pustu	26,06	32,87	29,91
Petugas kesehatan/ Praktek Nakes	20,69	19,77	22,23
Praktek Tradisional/Batra/ Dukun	1,94	0,91	1,70
Lainnya	3,90	2,09	1,12

Sumber : Susenas

3. PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama untuk dapat mencapai kemakmuran suatu negara, sebagaimana diatur secara tegas dalam pasal 31 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat (2) menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat (3) menetapkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Sedangkan ayat (4) menegaskan negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dari hal tersebut, dapat kita ketahui secara jelas bahwa negara kita menempatkan pendidikan pada prioritas pertama dengan mengalokasikan anggaran terbesar dari semua sektor. Pendidikan merupakan sektor yang memang perlu diprioritaskan negara karena menyentuh langsung hak masyarakat, dan sangat terkait erat dengan pembangunan sumber daya manusia di masa depan.

Titik berat pendidikan formal adalah peningkatan mutu pendidikan dan perluasan pendidikan dasar. Selain itu, ditingkatkan pula kesempatan belajar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk mencapai sasaran tersebut, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah, misalnya dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, perbaikan kurikulum, dan peningkatan kualitas tenaga pendidik.

3.1 Tingkat Pendidikan

Tabel 3.1 Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2014

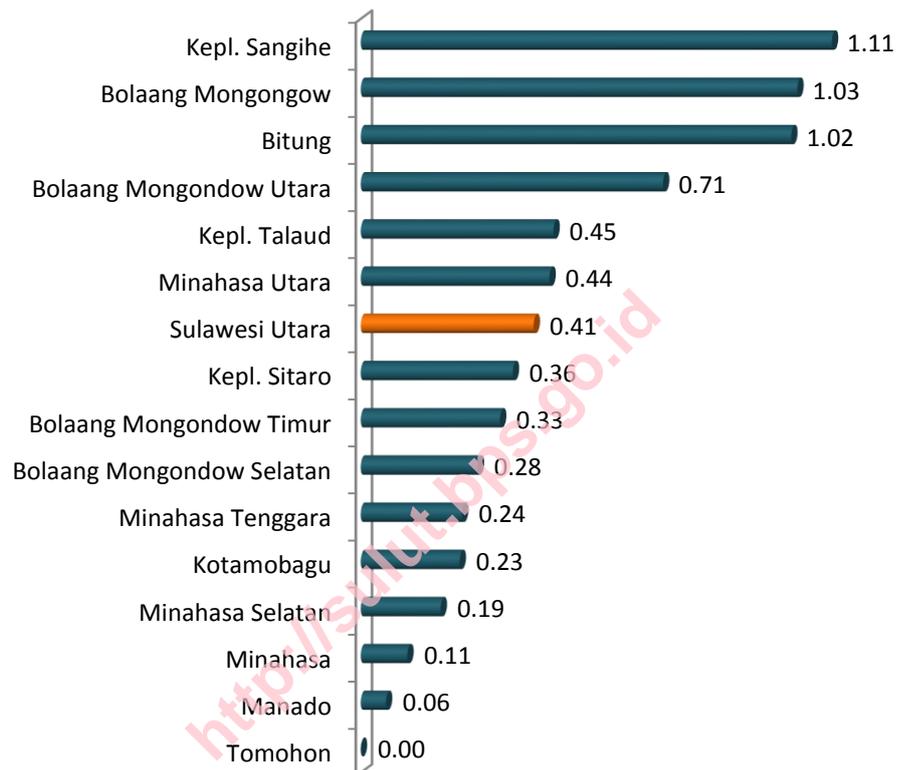
Kabupaten/Kota	Angka Melek Huruf
(1)	(2)
01. Bolaang Mongondow	98,97
02. Minahasa	99,89
03. Kep. Sangihe	98,89
04. Kep. Talaud	99,55
05. Minahasa Selatan	99,81
06. Minahasa Utara	99,56
07. Bolaang Mongondow Utara	99,29
08. Kep. Siau Tagulandang Biaro	99,64
09. Minahasa Tenggara	99,76
10. Bolaang Mongondow Selatan	99,72
11. Bolaang Mongondow Timur	99,67
71. Manado	99,94
72. Bitung	98,98
73. Tomohon	100,00
74. Kotamobagu	99,77
Sulawesi Utara	99,59

Sumber : Susenas 2014

Kemampuan baca-tulis penduduk dewasa merupakan ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan, yang tercermin dari data angka melek huruf, yaitu persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca huruf latin, huruf

arab, dan atau huruf lainnya. Penduduk yang dapat membaca huruf latin, huruf arab, dan atau huruf lainnya di Sulawesi Utara pada tahun 2014 sudah mencapai 99,59 persen, sisanya sebanyak 0,41 persen adalah penduduk usia 10 tahun ke atas yang tidak dapat membaca atau buta huruf.

Gambar 6. Angka Buta Huruf menurut Kabupaten/Kota, 2014



Angka buta huruf di Provinsi Sulawesi Utara sudah relatif rendah. Jika dilihat per kabupaten/kota, angka buta huruf tertinggi terdapat di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar 1,11 persen dan yang terendah terdapat di Kota Tomohon, yaitu 0,00 persen (Gambar 6). Akan tetapi bukan berarti program pemberantasan buta huruf di Kota Tomohon tidak diperlukan. *Sampling Error* dalam survei harus tetap diperhatikan. Masih ada kemungkinan penduduk 10 tahun ke atas yang buta huruf, jumlahnya sangat kecil.

Disamping itu dengan rendahnya angka buta huruf sebenarnya mempermudah identifikasi penduduk yang mengalami buta huruf dan diberikan perhatian khusus untuk mengikuti program pemberantasan buta huruf khususnya bagi mereka yang

masih berusia produktif. Selain itu dikaitkan dengan evaluasi kemajuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebelum tahun 2015 pengurangan angka buta huruf secara signifikan akan meningkatkan nilai IPM yang sekaligus menunjukkan perkembangan prestasi daerah dalam meningkatkan kualitas manusia. Tetapi, karena perubahan metode penghitungan IPM, sejak 2015 Angka Melek Huruf sudah bukan merupakan komponen penyusun IPM.

Tabel 3.2 Persentase Penduduk 10 tahun keatas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, 2014

Pendidikan yang Ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Tamat SD	21,46	20,64	21,06
Sekolah Dasar	23,37	22,96	23,17
SLTP	20,22	20,13	20,18
Sekolah Menengah/SMU	21,91	20,99	21,46
SM Kejuruan	6,61	7,42	7,00
Diploma I/II	0,44	0,46	0,45
Diploma III/Sarmud	1,02	1,46	1,23
Diploma IV/S I ke atas	4,97	5,94	5,45
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2014

Pemerintah Sulawesi Utara telah melakukan berbagai macam cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga diharapkan dapat menciptakan lulusan yang lebih berkualitas yang dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia Sulawesi Utara. Gambaran mengenai peningkatan SDM dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk usia 10 tahun keatas yang sudah menamatkan sekolah. Lebih dari setengah penduduk usia 10 tahun ke atas di Sulawesi Utara sudah menamatkan pendidikan minimal SLTP (55,77 %) dan sisanya adalah penduduk usia 10 tahun ke atas yang tidak punya ijazah (21,06 %) dan tamat SD (23,17 %).

Kesempatan laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang pendidikan secara tradisi sudah menunjukkan adanya kesetaraan. Hal tersebut dapat dilihat pada statistik pendidikan yang ditamatkan. Perempuan sedikit lebih banyak

yang menamatkan pendidikan minimal SLTP jika dibanding penduduk laki-laki yakni 56,40 persen berbanding 55,17 persen.

3.2 Tingkat Partisipasi Sekolah, Partisipasi Kasar, dan Partisipasi Murni

Program Wajib Belajar 9 tahun di Sulawesi Utara belum sepenuhnya berhasil. Ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada anak usia 7-12 tahun yang sebesar 98,95 persen (Tabel 3.3). Dengan kata lain masih ada 1,05 persen anak usia SD yang seharusnya bersekolah ternyata sudah berhenti atau putus sekolah. APS menunjukkan persentase anak usia sekolah yang sedang berada di jenjang pendidikan tertentu. Semakin besar nilai APS semakin berhasil program peningkatan kualitas pendidikan di suatu daerah.

Pada anak usia 13-15 tahun, APS lebih kecil lagi hanya sekitar 94,34 persen. Pada kelompok usia SLTA (16-18 tahun) APS jelas akan lebih kecil lagi, yaitu sekitar 71,98 persen, karena banyak diantara mereka sudah terjun ke dunia kerja. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin banyak anak yang berhenti sekolah.

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Usia Sekolah, 2014

Usia Sekolah (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
7 – 12	98,80	99,11	98,95
13 – 15	92,82	95,99	94,34
16 – 18	68,78	75,44	71,98

Sumber : Susenas 2014

Isu *gender* pada indikator APS Sulawesi Utara cukup menarik. Umumnya di Indonesia ataupun di negara-negara berkembang biasanya anak-anak perempuan ada diskriminasi untuk menikmati pendidikan. Mereka lebih dieksploitasi untuk membantu orang tuanya dalam mengurus urusan rumah tangga ataupun bekerja. Anak laki-laki justru mendapat perhatian lebih dalam hal pendidikan karena dialah yang diharapkan akan mengembalikan investasi sekolah atau dengan kata lain ada anggapan

rate of return investasi pendidikan pada anak laki-laki lebih besar dibanding perempuan. Di Sulawesi Utara yang terjadi sebaliknya, anak perempuan memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibanding anak laki-laki pada jenjang umur 7-12, 13-15, dan 16-18 tahun. Salah satu penyebabnya adalah anak laki-laki justru yang ”dikorbankan” oleh orang tuanya untuk tidak bersekolah dan sebagian dari mereka membantu orang tuanya bekerja.

Tabel 3.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan, 2014

Usia Sekolah (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	108,51	109,24	108,86
SMP/SLTP	84,34	91,35	87,70
SMA/SLTA	82,20	84,87	83,48

Sumber : Susenas 2014

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan proporsi anak sekolah pada jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK dimungkinkan lebih dari 100 persen karena ada penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu di luar kelompok usia yang seharusnya.

Tabel 3.5 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan, 2014

Usia Sekolah (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	94,31	92,45	93,42
SMP/SLTP	71,15	73,60	72,32
SMA/SLTA	61,32	62,08	61,69

Sumber : Susenas 2014

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan proporsi penduduk pada kelompok usia tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu. Pada tahun 2014, di Sulawesi Utara APM SD/Sederajat menunjukkan angka 93,42 persen. Hal tersebut berarti ada 93,42 persen anak usia 7-12 tahun yang bersekolah SD dibandingkan dengan jumlah

anak usia 7-12 tahun. Dengan kata lain, ada anak usia 7-12 tahun di Sulawesi Utara yang tidak bersekolah SD/ sederajat. Kemungkinan ada anak yang masih berumur 12 tahun tetapi sudah bersekolah SMP/ Sederajat atau ada anak yang sudah berumur 7 tahun tetapi belum bersekolah SD/ Sederajat (masih di Taman Kanak kanak).

<http://sulut.bps.go.id>

4. TARAF DAN POLA KONSUMSI

Berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan bahwa secara keseluruhan pendapatan penduduk meningkat, sedangkan meningkatnya jumlah penduduk miskin mengindikasikan menurunnya pendapatan penduduk. Dengan demikian jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat. Aspek lain yang perlu dipantau berkenaan dengan peningkatan pendapatan penduduk tersebut adalah bagaimana pendapatan tersebut terdistribusi di antara kelompok penduduk. Indikator distribusi pendapatan, walaupun didekati dengan pengeluaran, akan memberi petunjuk aspek pemerataan yang telah tercapai. Dari data pengeluaran dapat juga diungkapkan tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum dengan menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan.

4.1 Perkembangan Kemiskinan

Peliknya masalah kemiskinan mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah nyata dalam penanggulangannya, sehingga penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas yang utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mengurangi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.

Dalam analisis kemiskinan dikenal beberapa indikator penting yang dapat digunakan untuk mengukur kemiskinan. Indikator yang paling sering dipergunakan adalah *head-count index* (P_0). Ukuran ini memberikan gambaran tentang proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada suatu wilayah. Namun demikian, indikator ini tidak dapat mengindikasikan seberapa parah atau seberapa dalam tingkat kemiskinan yang terjadi, mengingat ukuran ini tetap tidak akan berubah jika seseorang yang miskin menjadi bertambah miskin.

Oleh karena itu, dikenal juga indikator kemiskinan yang lain, yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Namun demikian, indeks ini tidak sensitif

terhadap distribusi pendapatan di antara penduduk miskin, sehingga dibutuhkan indikator lain guna mengukur tingkat keparahan kemiskinan (P_2). Penurunan pada P_1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, yang mengindikasikan berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan. Sedangkan berkurangnya penurunan pada P_2 mengindikasikan berkurangnya ketimpangan kemiskinan.

Tabel 4.1 Perkembangan Kemiskinan, 2013 - 2014

Indikator Kemiskinan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
1. Persentase Penduduk Miskin (P_0)	8,50 (201,09)*	8,26 (197,56)*
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)	1,16	1,28
3. Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2)	0,28	0,30

Catatan: Angka dalam tanda kurung menyatakan jumlah penduduk miskin (ribu)

Tanda bintang menunjukkan angka jumlah penduduk miskin sudah disesuaikan dengan angka proyeksi penduduk

Sumber : Susenas

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa terjadi pengurangan jumlah penduduk miskin di Sulawesi Utara, yaitu sebanyak 201,09 ribu orang di tahun 2013 menjadi sebanyak 197,56 ribu orang di tahun 2014. Hal tersebut akibat dari menurunnya persentase jumlah penduduk miskin, pada tahun 2013 sebesar 8,50 persen menjadi 8,26 persen pada tahun 2014.

Persoalan kemiskinan tidak hanya mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin, namun juga perlu memperhatikan jarak terhadap batas miskin (tingkat kedalaman kemiskinan) dan ketimpangan antar penduduk miskin (tingkat keparahan kemiskinan) oleh karena itu selain harus mampu mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan. Selama periode 2013-2014 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2) mengalami kenaikan. Pergerakan Indeks kedalaman kemiskinan meningkat, hal itu mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis

kemiskinan semakin besar. Indeks Kedalaman Kemiskinan meningkat dari 1,16 di tahun 2013 menjadi 1,28 di tahun 2013. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan yang mengalami kenaikan yang mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin lebar. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami kenaikan dari 0,28 di tahun 2013 menjadi 0,30 di tahun 2014.

4.2 Perkembangan Tingkat Kesejahteraan

Determinan dari kesejahteraan ekonomi adalah kemampuan daya beli penduduk. Penurunan kemampuan daya beli akan mengurangi kemampuan pemenuhan kebutuhan pokok. Pengeluaran per kapita per bulan penduduk Sulawesi Utara selama periode 2012-2013 mengalami peningkatan sebesar 9,21 persen dan terus meningkat sebesar 6,82 persen dari periode 2013-2014. Hal tersebut merupakan pertanda positif untuk peningkatan kemampuan daya beli masyarakat. Tetapi di sisi lain, persentase kenaikan kemampuan daya beli masyarakat mengalami perlambatan.

Persentase kenaikan pengeluaran per kapita per bulan penduduk Sulawesi Utara mengalami penurunan selama periode 2012-2014, yaitu 9,21 pada periode 2012-2013 menjadi 6,82 persen pada periode 2013-2014.

Tabel 4.2 Pengeluaran Per Kapita Per Bulan(Rp), 2012 - 2014

Tahun	Pengeluaran per Kapita per Bulan (Rp)	Kenaikan Nominal Setahun (%)
(1)	(2)	(3)
2012	678.482	9,21
2013	740.942	6,82
2014	791.494	

Sumber : Susenas

4.3 Pengeluaran Rumah Tangga

Pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai perubahan tingkat kesejahteraan. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran

akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau ditabung.

Pada tabel 4.3 terlihat bahwa persentase pengeluaran untuk makanan pada tahun 2014 menurun dibandingkan tahun 2013. Persentase pengeluaran untuk makanan pada tahun 2014 terhitung 50,44 persen, sedangkan pada tahun 2013 sebesar 51,11 persen. Sebaliknya persentase pengeluaran untuk bukan makanan pada tahun 2014 lebih tinggi dibandingkan tahun 2013. Hal tersebut menggambarkan adanya pergeseran pengeluaran non-makanan menjadi pengeluaran makanan dari tahun 2013 ke tahun 2014.

Tabel 4.3 Pengeluaran Rata-rata (Rp) Nominal dan Persentase Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan selama Sebulan, 2013-2014

Jenis Pengeluaran	Pengeluaran Per Kapita Sebulan			
	Nominal		Persentase	
	2013	2014	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	378.690	399.223	51,11	50,44
Non Makanan :	362.252	392.271	48,89	49,56
Perumahan	163.230	170.669	22,03	21,56
Barang dan Jasa	129.055	146.781	17,42	18,54
Pakaian	26.069	27.684	3,52	3,50
Barang Tahan Lama	21.147	19.468	2,85	2,46
Lainnya	22.751	27.669	3,07	3,50
Jumlah	740.942	791.494	100,00	100,00

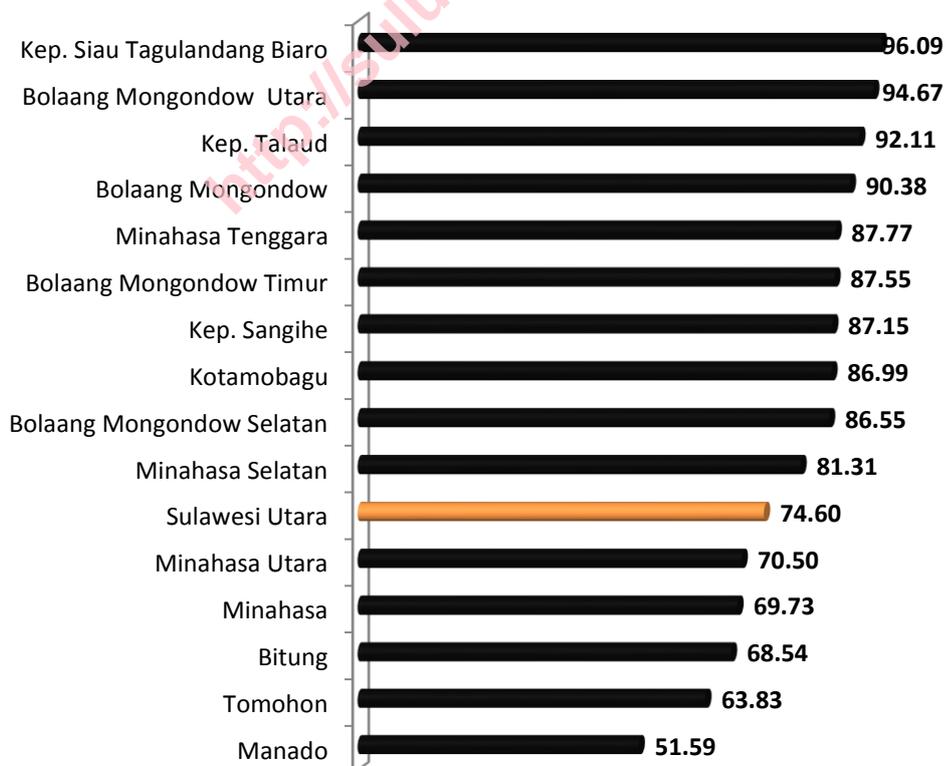
Sumber : Susenas

5. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Sepanjang kehidupannya, manusia selalu membutuhkan rumah yang merupakan salah satu kebutuhan pokok hidupnya selain sandang dan pangan untuk mempertahankan diri dari keganasan alam. Dengan kata lain, rumah merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk dapat terus bertahan hidup. Apabila rumah sebagai salah satu kebutuhan pokok tersebut tidak dapat tersedia, maka manusia akan sulit untuk hidup secara layak.

Selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial selalu ingin hidup bersama dengan orang lain dan berinteraksi antara satu dengan lainnya, sehingga satu persatu bangunan rumah tinggal bermunculan sampai terbentuk suatu pemukiman rumah penduduk.

Gambar 7. Persentase Rumahtangga yang Menempati Rumah Sendiri per Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, 2014



Sebanyak 74,60 persen rumah tangga di Provinsi Sulawesi Utara menempati rumahnya sendiri. Sisanya menempati rumah kontrak, kos, rumah dinas, rumah bebas sewa, rumah milik orangtua, dan lainnya. Dari gambar 7 terlihat bahwa rumahtangga di Kota Manado yang menempati rumahnya sendiri memiliki persentase terendah dibandingkan kab/kota lainnya, yaitu sebesar 51,59 persen. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah karena lebih banyaknya pendatang di Kota Manado dibandingkan kab/kota lainnya.

Manusia membutuhkan rumah disamping sebagai tempat untuk berteduh dan berlindung dari hujan maupun panas, rumah juga diperlukan untuk memberi rasa aman penghuninya dari gangguan yang tidak diinginkan. Rumah menjadi tempat berkumpul bagi para penghuni rumah yang biasanya merupakan satu ikatan keluarga. Rumah dapat dijadikan sebagai salah satu indikator bagi kesejahteraan pemiliknya. Semakin baik fasilitas yang dimiliki, dapat diasumsikan semakin sejahtera rumahtangga yang menempati rumah tersebut. Berbagai fasilitas yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan tersebut antara lain dapat dilihat dari luas lantai rumah, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar rumahtangga dan juga tempat penampungan kotoran terakhir.

5.1 Kualitas Rumah Tinggal

Rumah merupakan tempat berkumpul bagi semua anggota keluarga sebagai tempat untuk menghabiskan sebagian besar waktu mereka, sehingga kondisi kesehatan perumahan juga sangat terkait erat dengan kondisi kesehatan setiap anggota keluarga maupun tetangga sekitar. Bila kondisi perumahan sehat, tentunya peluang setiap anggota rumahtangga untuk memiliki kondisi tubuh yang sehat juga sangat besar. Namun sebaliknya, jika kondisi rumah tidak sehat maka potensi terjadi penularan penyakit juga sangat besar.

Salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai kesehatan perumahan diantaranya adalah luas lantai rumah/tempat tinggal. Luas lantai rumah tempat tinggal selain digunakan sebagai indikator untuk menilai kemampuan sosial masyarakat, secara tidak langsung juga dikaitkan dengan sistem kesehatan lingkungan keluarga atau tempat tinggal (perumahan). Luas lantai erat kaitannya dengan tingkat kepadatan hunian atau rata-rata luas ruang untuk setiap anggota keluarga.

Tabel 5.1 Persentase Rumahtangga menurut Indikator Kualitas dan Fasilitas Perumahan di Sulawesi Utara, 2013 – 2014

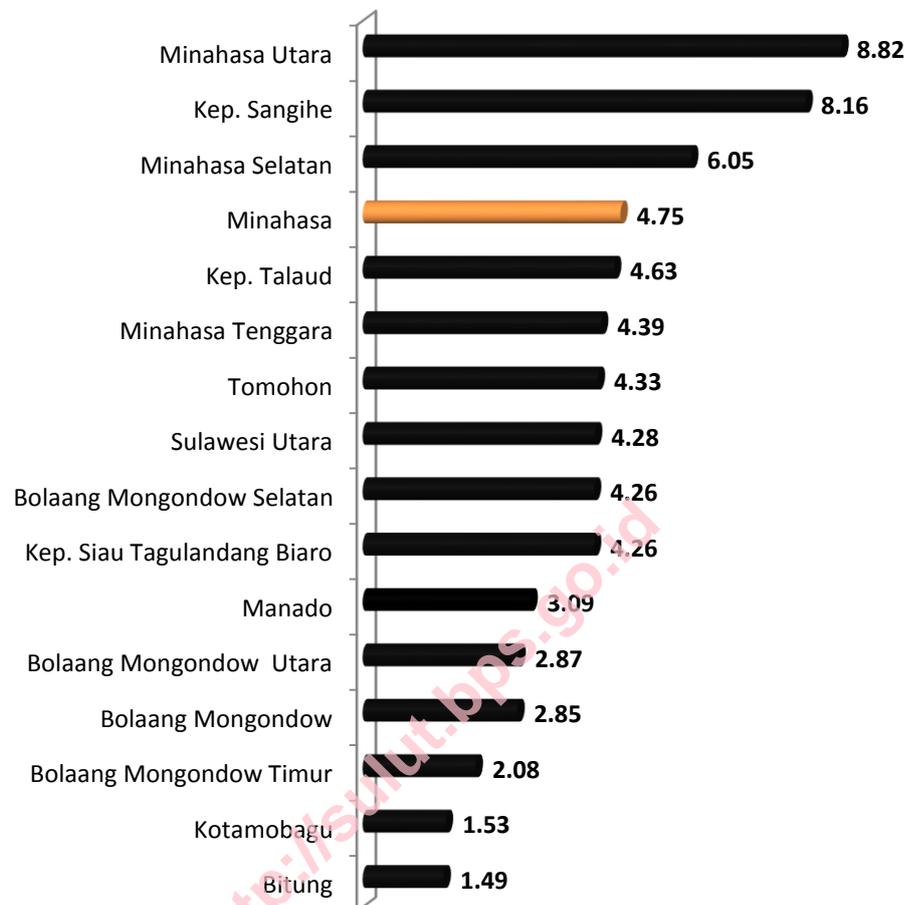
Indikator	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Kualitas		
Lantai Tanah	4,86	4,28
Atap Layak *	97,18	97,71
Dinding Permanen	93,09	93,74
Fasilitas		
Luas Lantai < 20 m ²	4,32	4,66
Air Minum Leding & Kemasan	49,03	48,31
Air minum bersih **	70,03	69,88
Jamban Sendiri	67,52	69,52

Catatan : * Tidak beratap dedaunan

** Air minum yang bersumber dari leding, air kemasan, pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah ≥ 10 m

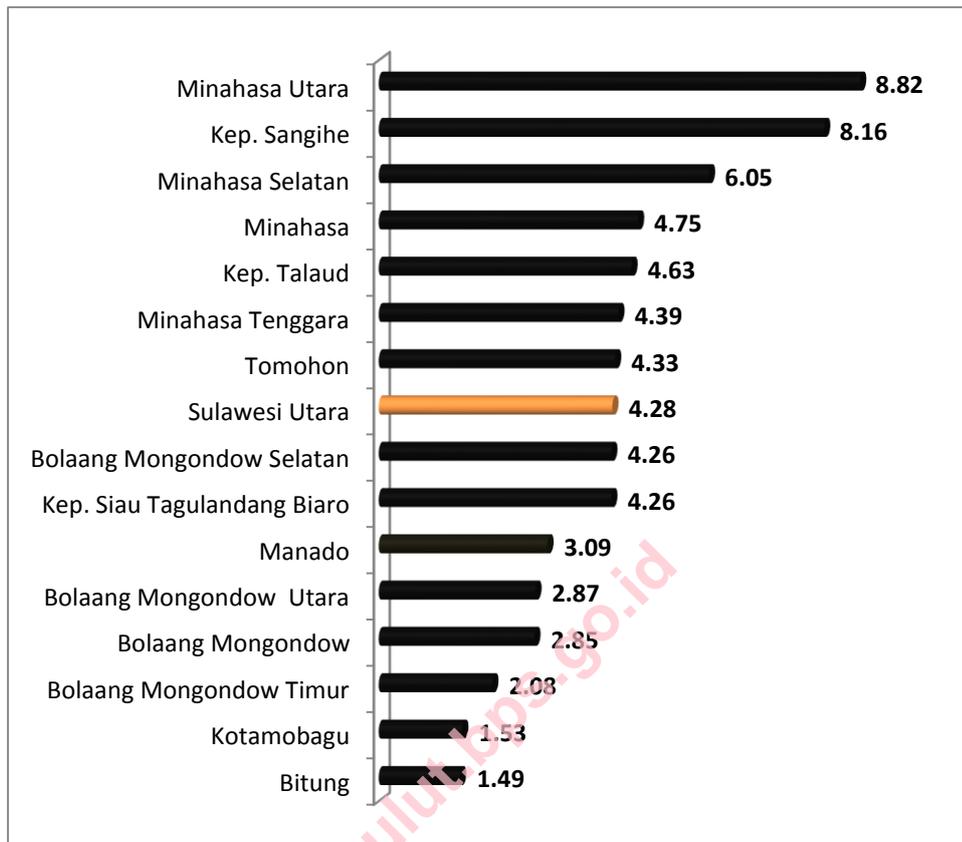
Jika dilihat per kabupaten/kota pada Gambar 8, masih ada sebanyak 8,87 persen rumahtangga di Kota Manado yang tinggal di rumah yang mempunyai luas kurang dari 20 m². Hal ini lazim ditemui di Provinsi Sulawesi Utara karena hubungan kekerabatan yang masih erat, sehingga beberapa anggota rumahtangga yang sudah berkeluarga menempati rumah yang sama dengan keluarga-keluarga lain yang masih memiliki ikatan persaudaraan. Sementara itu, persentase terkecil rumah tangga yang mempunyai luas lantai rumah kurang dari 20 m² adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe (0,85 %).

Gambar 8 . Persentase Rumah Tangga dengan Lantai Rumah < 20 m² Per Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2014



Selain luas lantai, jenis lantai juga dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kualitas perumahan. Semakin baik kualitas lantai perumahan dapat diasumsikan semakin membaik tingkat kesejahteraan penduduknya. Rumahtangga dengan jenis lantai keramik atau marmer mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik daripada rumahtangga yang mempunyai jenis lantai semen, ubin atau tanah. Selain itu, jenis lantai juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Lantai tanah dapat menjadi media yang subur bagi timbulnya kuman penyakit dan media penularan bagi jenis penyakit tertentu, seperti penyakit diare, cacangan dan penyakit kulit. Berdasarkan data Susenas 2014, masih ada 4,28 persen rumah tangga di Sulawesi Utara yang berlantaikan tanah. Semakin rendah persentase rumah tangga yang mendiami rumah dengan lantai tanah akan berpengaruh pada tingginya derajat kesehatan masyarakat.

Gambar 9. Persentase Rumahtangga Berlantai Tanah Per Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2014



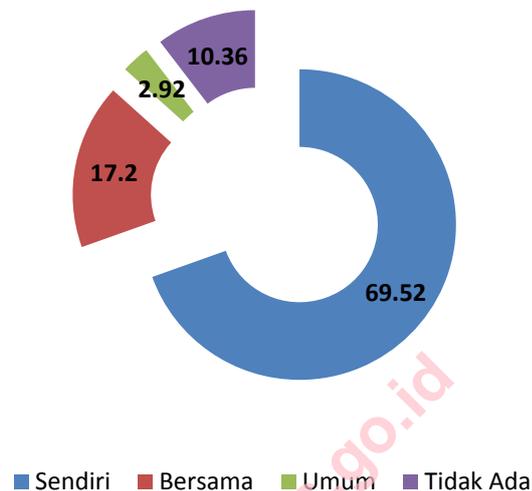
Indikator kualitas perumahan yang lain diantaranya adalah rumahtangga dengan atap yang layak (tidak beratap dedaunan) dan dinding permanen. Sebagian besar masyarakat di Sulawesi Utara tinggal di rumah yang beratap seng. Data tahun 2014 menunjukkan bahwa terdapat 97,71 persen rumahtangga yang tinggal di rumah yang beratap layak. Demikian juga dinding, sebanyak 93,74 persen rumahtangga di Sulawesi Utara rumahnya berdinding permanen.

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah akan menentukan nyaman atau tidaknya suatu rumah tinggal, yang juga menentukan kualitas suatu rumah tinggal. Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya sarana penerangan listrik, air bersih serta jamban dengan tangki septik.

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumahtangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih

yang terus menerus diupayakan pemerintah. Pada tahun 2014, rumahtangga di Sulawesi Utara yang dapat mengakses air bersih mencapai 69,88 persen.

Gambar 10. Persentase Fasilitas Tempat Buang Air Besar Rumahtangga di Sulawesi Utara, 2014



Sistem pembuangan kotoran/air besar manusia sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan resiko penularan suatu penyakit, khususnya penyakit saluran pencernaan. Klasifikasi sarana pembuangan kotoran dilakukan berdasarkan atas tingkat resiko pencemaran yang mungkin ditimbulkan. Masalah kondisi lingkungan tempat pembuangan kotoran manusia tidak terlepas dari aspek kepemilikan terhadap sarana yang digunakan terutama dikaitkan dengan tanggungjawab dalam pemeliharaan dan kebersihan sarana. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik. Di Sulawesi Utara, pada tahun 2014 terdapat 69,52 persen rumahtangga yang memiliki jamban sendiri.

<http://sulut.bps.go.id>

-Halaman ini sengaja dikosongkan-

LAMPIRAN

<http://sulut.bps.go.id>

TABEL 1.1
PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA
DAN KELOMPOK UMUR PRODUKTIF/NON PRODUKTIF, 2014

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur			Jumlah
	0 – 14	15 – 64	65+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Bolaang Mongondow	29,00	65,94	5,06	100,00
02 Minahasa	23,44	68,38	8,18	100,00
03 Kep. Sangihe	23,35	69,34	7,31	100,00
04 Kep. Talaud	27,21	66,56	6,23	100,00
05 Minahasa Selatan	26,18	66,51	7,31	100,00
06 Minahasa Utara	26,33	67,97	5,70	100,00
07 Bolaang Mongondow Utara	30,46	64,68	4,86	100,00
08 Kep. Siau Tagulandang Biaro	23,54	68,19	8,27	100,00
09 Minahasa Tenggara	28,63	65,14	6,23	100,00
10 Bolaang Mongondow Selatan	32,98	63,70	3,32	100,00
11 Bolaang Mongondow Timur	27,61	67,71	4,68	100,00
71 Manado	24,09	71,43	4,48	100,00
72 Bitung	27,92	68,41	3,67	100,00
73 Tomohon	23,63	69,18	7,19	100,00
74 Kotamobagu	26,47	69,28	4,25	100,00
Sulawesi Utara	26,05	68,15	5,80	100,00

TABEL 1.2
PENDUDUK PROVINSI SULAWESI UTARA MENURUT KELOMPOK
UMUR DAN JENIS KELAMIN, 2014

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
0 – 4	107.360	102.300	209.660
5 – 9	105.799	101.098	206.897
10 – 14	105.686	99.360	205.046
15 – 19	103.020	97.219	200.239
20 – 24	103.077	94.867	197.944
25 – 29	100.981	90.023	191.004
30 – 34	93.609	88.426	182.035
35 – 39	90.612	88.072	178.684
40 – 44	89.330	85.712	175.042
45 – 49	83.399	79.228	162.627
50 – 54	70.397	67.129	137.526
55 – 59	58.972	56.625	115.597
60 – 64	43.437	42.459	85.896
65 – 69	26.926	28.482	55.408
70 – 74	16.840	19.670	36.510
75 +	18.315	28.174	46.489
Sulawesi Utara	1.217.760	1.168.844	2.386.604

TABEL 1.3
PERSENTASE PENDUDUK WANITA BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS
YANG PERNAH KAWIN MENURUT KAB/KOTA DAN UMUR
PERKAWINAN PERTAMA, 2014

Kabupaten/Kota	Umur Perkawinan Pertama					Jumlah
	<= 15	16	17 - 18	19 - 24	25 +	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Bolaang Mongondow	4,43	6,07	25,17	49,49	14,85	100,00
02. Minahasa	2,25	6,46	17,25	56,03	18,01	100,00
03. Kep. Sangihe	1,84	2,29	13,73	56,78	25,37	100,00
04. Kep. Talaud	3,48	4,91	17,77	50,44	23,40	100,00
05. Minahasa Selatan	4,35	7,21	18,47	57,34	12,63	100,00
06. Minahasa Utara	3,94	6,17	20,55	52,19	17,14	100,00
07. Bolaang Mongondow Utara	7,71	6,37	27,40	44,68	13,83	100,00
08. Kep. Siau Tagulandang Biaro	2,84	2,77	16,40	53,27	24,73	100,00
09. Minahasa Tenggara	2,69	6,64	20,57	55,82	14,28	100,00
10. Bolaang Mongondow Selatan	6,84	5,34	29,86	49,93	8,03	100,00
11. Bolaang Mongondow Timur	6,20	7,43	28,53	45,70	12,13	100,00
71. Manado	1,33	2,53	15,83	54,62	25,70	100,00
72. Bitung	4,09	8,45	19,96	48,75	18,75	100,00
73. Tomohon	0,36	3,09	10,49	63,38	22,67	100,00
74. Kotamobagu	7,71	6,43	22,23	45,53	18,09	100,00
Sulawesi Utara	3,41	5,42	19,16	53,15	18,86	100,00

TABEL 2.1
PERSENTASE PENDUDUK LAKI-LAKI+PEREMPUAN YANG
MENDERITA SAKIT SELAMA SEBULAN YANG LALU MENURUT
KABUPATEN/KOTA DAN JUMLAH HARI SAKIT, 2014

Kabupaten/Kota	Jumlah Hari Sakit					Jumlah
	<=3	4-7	8-14	15-21	22-30	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01 Bolaang Mongondow	47,87	39,57	5,50	1,36	5,69	100,00
02 Minahasa	52,34	33,79	7,98	0,09	5,81	100,00
03 Kep. Sangihe	61,75	27,96	5,14	0,31	4,84	100,00
04 Kep. Talaud	70,88	19,88	2,83	1,67	4,73	100,00
05 Minahasa Selatan	50,62	33,61	7,23	1,77	6,76	100,00
06 Minahasa Utara	49,76	35,38	6,27	2,57	6,01	100,00
07 Bolaang Mongondow Utara	38,38	44,23	8,45	3,08	5,86	100,00
08 Kep. Siau Tagulandang Biaro	49,13	33,11	12,47	0,00	5,30	100,00
09 Minahasa Tenggara	48,65	41,53	6,07	1,33	2,41	100,00
10 Bolaang Mongondow Selatan	46,71	38,86	7,85	2,67	3,90	100,00
11 Bolaang Mongondow Timur	67,01	22,40	1,96	0,00	8,63	100,00
71 Manado	49,54	36,36	7,79	0,45	5,86	100,00
72 Bitung	51,85	33,99	8,30	0,81	5,05	100,00
73 Tomohon	75,86	13,00	3,81	0,00	7,33	100,00
74 Kotamobagu	57,68	31,17	7,02	1,94	2,19	100,00
Sulawesi Utara	52,03	34,56	6,75	1,23	5,42	100,00

TABEL 2.2
PERSENTASE BALITA MENURUT PENOLONG KELAHIRAN PERTAMA
DAN KAB/KOTA, 2014

Kabupaten/Kota	Penolong Kelahiran Pertama						Jumlah
	Dokter	Bidan	Tenaga para- medis Lain	Dukun	Famili/ keluarga	Lain- nya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01. Bolaang Mongondow	20,90	53,19	0,60	23,43	0,94	0,94	100,00
02. Minahasa	44,80	48,01	3,22	3,97	0,00	0,00	100,00
03. Kep. Sangihe	46,21	42,76	1,99	8,50	0,54	0,00	100,00
04. Kep. Talaud	15,83	50,72	0,31	29,47	3,68	0,00	100,00
05. Minahasa Selatan	36,37	50,48	0,69	10,46	0,00	2,00	100,00
06. Minahasa Utara	42,54	35,80	4,85	16,80	0,00	0,00	100,00
07. Bolaang Mongondow Utara	20,49	48,92	0,00	29,40	0,00	1,18	100,00
08. Kep. Siau Tagulandang Biaro	33,91	47,19	0,00	16,67	2,23	0,00	100,00
09. Minahasa Tenggara	23,53	59,49	1,05	14,83	0,00	1,10	100,00
10. Bolaang Mongondow Selatan	7,31	40,85	1,98	48,52	1,33	0,00	100,00
11. Bolaang Mongondow Timur	21,52	38,28	0,00	32,75	7,45	0,00	100,00
71. Manado	69,56	26,86	0,00	3,03	0,54	0,00	100,00
72. Bitung	40,57	44,51	0,00	12,89	1,05	0,98	100,00
73. Tomohon	45,92	46,70	7,38	0,00	0,00	0,00	100,00
74. Kotamobagu	14,12	80,43	0,00	3,87	1,58	0,00	100,00
Sulawesi Utara	38,53	45,45	1,48	13,25	0,82	0,46	100,00

TABEL 2.3
PERSENTASE BALITA MENURUT PENOLONG KELAHIRAN TERAKHIR
DAN KAB/KOTA, 2014

Kabupaten/Kota	Penolong Kelahiran Terakhir						Jumlah
	Dokter	Bidan	Tenaga para- medis Lain	Dukun	Famili/ keluarga	Lain- nya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01. Bolaang Mongondow	20,62	55,79	0,00	21,71	0,94	0,94	100,00
02. Minahasa	41,03	51,79	3,22	3,97	0,00	0,00	100,00
03. Kep. Sangihe	48,48	41,21	1,99	7,78	0,54	0,00	100,00
04. Kep. Talaud	17,07	60,33	0,31	22,29	0,00	0,00	100,00
05. Minahasa Selatan	39,54	47,32	0,00	11,14	0,00	2,00	100,00
06. Minahasa Utara	56,80	29,98	1,53	11,69	0,00	0,00	100,00
07. Bolaang Mongondow Utara	18,19	64,12	0,00	17,68	0,00	0,00	100,00
08. Kep. Siau Tagulandang Biaro	30,90	51,94	0,00	16,67	0,48	0,00	100,00
09. Minahasa Tenggara	23,42	59,60	1,05	14,83	0,00	1,10	100,00
10. Bolaang Mongondow Selatan	9,84	63,79	16,90	9,47	0,00	0,00	100,00
11. Bolaang Mongondow Timur	18,89	55,67	0,00	23,25	2,18	0,00	100,00
71. Manado	61,25	34,84	0,88	3,03	0,00	0,00	100,00
72. Bitung	47,81	37,97	0,67	12,10	0,47	0,98	100,00
73. Tomohon	51,27	48,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
74. Kotamobagu	16,75	79,38	0,00	3,87	0,00	0,00	100,00
Sulawesi Utara	39,37	48,12	1,45	10,40	0,24	0,42	100,00

TABEL 2.4
PERSENTASE PENDUDUK LAKI-LAKI+PEREMPUAN YANG MENGOBATI
SENDIRI SELAMA SEBULAN TERAKHIR MENURUT KAB/KOTA DAN JENIS
OBAT YANG DIGUNAKAN, 2014

Kabupaten/Kota	Jenis Obat yang Digunakan		
	Modern	Tradisional	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Bolaang Mongondow	92,66	15,44	2,45
02. Minahasa	95,64	7,47	1,85
03. Kep. Sangihe	83,77	28,86	0,64
04. Kep. Talaud	96,41	10,91	0,80
05. Minahasa Selatan	90,75	9,56	1,28
06. Minahasa Utara	88,40	18,51	2,25
07. Bolaang Mongondow Utara	86,10	21,86	5,79
08. Kep. Siau Tagulandang Biaro	87,24	28,06	1,13
09. Minahasa Tenggara	92,09	6,31	3,30
10. Bolaang Mongondow Selatan	95,67	8,53	4,10
11. Bolaang Mongondow Timur	89,30	16,11	4,29
71. Manado	94,94	5,75	2,60
72. Bitung	90,64	12,19	2,18
73. Tomohon	93,25	8,47	1,42
74. Kotamobagu	96,12	6,96	2,18
Sulawesi Utara	92,07	12,30	2,35

TABEL 2.5
PERSENTASE KUNJUNGAN PENDUDUK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
YANG BEROBAT JALAN SELAMA SEBULAN YANG LALU MENURUT
KAB/KOTA DAN TEMPAT/CARA BEROBAT, 2014

Bersambung

Kabupaten/Kota	Tempat/Cara Berobat			
	Rumah Sakit Pemerintah	Rumah Sakit Swasta	Praktek Dokter	Puskesmas /Pustu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Bolaang Mongondow	2,34	1,26	24,68	27,69
02. Minahasa	6,59	5,57	39,20	26,56
03. Kep. Sangihe	6,48	0,00	31,21	49,01
04. Kep. Talaud	6,47	0,00	24,96	55,32
05. Minahasa Selatan	4,88	10,99	34,18	10,84
06. Minahasa Utara	3,97	1,16	44,60	25,20
07. Bolaang Mongondow Utara	8,05	1,17	8,35	54,48
08. Kep. Siau Tagulandang Biaro	9,45	0,00	29,37	50,85
09. Minahasa Tenggara	6,50	0,95	31,77	30,48
10. Bolaang Mongondow Selatan	2,58	1,76	19,71	37,54
11. Bolaang Mongondow Timur	8,36	4,15	21,72	19,33
71. Manado	13,17	3,74	58,40	22,58
72. Bitung	5,36	2,26	50,95	25,06
73. Tomohon	0,71	8,24	22,50	51,16
74. Kotamobagu	9,07	0,87	33,69	36,62
Sulawesi Utara	6,09	3,27	35,68	29,91

TABEL 2.5
PERSENTASE KUNJUNGAN PENDUDUK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
YANG BEROBAT JALAN SELAMA SEBULAN YANG LALU MENURUT
KAB/KOTA DAN TEMPAT/CARA BEROBAT, 2014

Kabupaten/Kota	Tempat/Cara Berobat				Jumlah
	Praktek Nakes	Praktek Batra	Dukun Bersalin	Lainnya	
	(1)	(6)	(7)	(8)	
01. Bolaang Mongondow	40,24	2,44	0,60	0,75	100,00
02. Minahasa	18,97	2,90	0,00	0,22	100,00
03. Kep. Sangihe	12,75	0,00	0,25	0,31	100,00
04. Kep. Talaud	12,66	0,59	0,00	0,00	100,00
05. Minahasa Selatan	38,56	0,00	0,00	0,56	100,00
06. Minahasa Utara	21,46	0,96	0,33	2,33	100,00
07. Bolaang Mongondow Utara	22,21	2,73	1,08	1,93	100,00
08. Kep. Siau Tagulandang Biaro	10,07	0,00	0,00	0,27	100,00
09. Minahasa Tenggara	25,50	2,08	0,41	2,20	100,00
10. Bolaang Mongondow Selatan	33,02	5,09	0,00	0,29	100,00
11. Bolaang Mongondow Timur	35,07	3,86	3,61	3,89	100,00
71. Manado	1,07	0,17	0,00	0,86	100,00
72. Bitung	14,06	0,96	0,00	1,36	100,00
73. Tomohon	13,46	2,80	0,00	1,12	100,00
74. Kotamobagu	17,33	0,45	0,87	1,11	100,00
Sulawesi Utara	22,23	1,37	0,33	1,12	100,00

TABEL 3.1
PERSENTASE PENDUDUK LAKI-LAKI+PEREMPUAN BERUMUR 10
TAHUN KEATAS MENURUT KAB/KOTA DAN IJAZAH/STTB TERTINGGI
YANG DIMILIKI, 2014

Bersambung

Kabupaten/Kota	Ijazah/STTB Tertinggi yang dimiliki			
	Tdk/Blm punya Ijazah SD	SD/MI/Paket A	SLTP/MTs/Paket B	SMU/MA/Paket C
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Bolaang Mongondow	31,57	30,64	21,28	11,76
02. Minahasa	17,86	18,84	19,00	25,53
03. Kep. Sangihe	30,09	20,32	22,35	14,86
04. Kep. Talaud	19,95	28,76	21,64	17,71
05. Minahasa Selatan	24,24	27,23	19,40	19,29
06. Minahasa Utara	22,13	22,93	21,11	22,55
07. Bolaang Mongondow Utara	31,59	31,83	17,38	11,27
08. Kep. Siau Tagulandang Biaro	22,68	27,60	23,46	16,25
09. Minahasa Tenggara	21,63	28,22	22,13	17,82
10. Bolaang Mongondow Selatan	27,76	36,71	17,83	13,20
11. Bolaang Mongondow Timur	24,22	38,02	20,57	11,35
71. Manado	13,06	13,71	18,38	31,92
72. Bitung	19,80	22,47	21,67	22,03
73. Tomohon	14,73	16,98	21,11	26,59
74. Kotamobagu	17,08	27,39	19,91	19,40
Sulawesi Utara	21,06	23,17	20,18	21,46

TABEL 3.1
PERSENTASE PENDUDUK LAKI-LAKI+PEREMPUAN BERUMUR 10
TAHUN KEATAS MENURUT KAB/KOTA DAN IJAZAH/STTB TERTINGGI
YANG DIMILIKI, 2014

Sambungan

Kabupaten/Kota	Ijazah/STTB Tertinggi yang dimiliki				Jumlah
	SMK	Diploma I/II	D III/ Sarjana Muda	D IV/ S1 ke atas	
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01. Bolaang Mongondow	2,80	0,29	0,29	1,36	100,00
02. Minahasa	10,28	0,41	1,61	6,46	100,00
03. Kep. Sangihe	6,68	0,37	1,79	3,53	100,00
04. Kep. Talaud	4,17	1,21	0,96	5,59	100,00
05. Minahasa Selatan	6,46	0,16	0,30	2,92	100,00
06. Minahasa Utara	6,43	0,48	0,77	3,61	100,00
07. Bolaang Mongondow Utara	2,78	0,30	1,07	3,79	100,00
08. Kep. Siau Tagulandang Biaro	5,68	0,37	0,96	2,99	100,00
09. Minahasa Tenggara	4,70	0,38	2,18	2,93	100,00
10. Bolaang Mongondow Selatan	1,52	0,42	0,66	1,90	100,00
11. Bolaang Mongondow Timur	3,28	0,49	0,65	1,42	100,00
71. Manado	8,70	0,37	2,10	11,78	100,00
72. Bitung	8,69	0,63	0,71	4,00	100,00
73. Tomohon	11,17	1,03	1,52	6,87	100,00
74. Kotamobagu	7,58	0,46	1,48	6,69	100,00
Sulawesi Utara	7,00	0,45	1,23	5,45	100,00

TABEL 3.2
ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) UMUR 7 - 12 TAHUN MENURUT
KABUPATEN/KOTA DAN JENIS KELAMIN, 2014

Kabupaten/Kota	7 - 12 Tahun		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Bolaang Mongondow	98,14	97,74	97,96
02. Minahasa	98,64	98,64	98,64
03. Kep. Sangihe	100,00	100,00	100,00
04. Kep. Talaud	100,00	100,00	100,00
05. Minahasa Selatan	100,00	99,37	99,68
06. Minahasa Utara	98,07	100,00	98,89
07. Bolaang Mongondow Utara	98,05	99,19	98,56
08. Kep. Siau Tagulandang Biaro	100,00	100,00	100,00
09. Minahasa Tenggara	99,49	100,00	99,73
10. Bolaang Mongondow Selatan	97,66	100,00	98,72
11. Bolaang Mongondow Timur	100,00	100,00	100,00
71. Manado	98,51	98,99	98,74
72. Bitung	98,89	98,16	98,53
73. Tomohon	99,53	100,00	99,76
74. Kotamobagu	97,64	98,86	98,27
Sulawesi Utara	98,80	99,11	98,95

TABEL 3.3
ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) UMUR 13 - 15 TAHUN MENURUT
KABUPATEN/KOTA DAN JENIS KELAMIN, 2014

Kabupaten/Kota	13 - 15 Tahun		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Bolaang Mongondow	89,57	90,72	90,16
02. Minahasa	92,34	97,99	95,31
03. Kep. Sangihe	91,73	96,21	93,75
04. Kep. Talaud	98,48	100,00	99,14
05. Minahasa Selatan	86,83	95,00	90,79
06. Minahasa Utara	95,03	94,69	94,87
07. Bolaang Mongondow Utara	89,64	98,83	94,20
08. Kep. Siau Tagulandang Biaro	92,08	100,00	95,29
09. Minahasa Tenggara	94,12	100,00	96,81
10. Bolaang Mongondow Selatan	96,07	94,68	95,31
11. Bolaang Mongondow Timur	91,58	100,00	96,11
71. Manado	93,10	93,18	93,14
72. Bitung	93,68	100,00	96,86
73. Tomohon	97,76	99,29	98,32
74. Kotamobagu	95,46	92,91	94,19
Sulawesi Utara	92,82	95,99	94,34

TABEL 3.4
ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) UMUR 16 - 18 TAHUN MENURUT
KABUPATEN/KOTA DAN JENIS KELAMIN, 2014

Kabupaten/Kota	16 - 18 Tahun		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Bolaang Mongondow	56,72	71,71	62,74
02. Minahasa	74,38	71,08	72,89
03. Kep. Sangihe	66,76	78,54	71,91
04. Kep. Talaud	97,68	83,44	91,90
05. Minahasa Selatan	66,94	80,53	73,65
06. Minahasa Utara	71,98	71,65	71,81
07. Bolaang Mongondow Utara	73,27	82,66	78,59
08. Kep. Siau Tagulandang Biaro	70,40	71,06	70,75
09. Minahasa Tenggara	64,78	77,94	71,16
10. Bolaang Mongondow Selatan	64,78	84,26	71,97
11. Bolaang Mongondow Timur	52,62	77,24	63,95
71. Manado	81,62	74,58	77,79
72. Bitung	50,87	72,53	61,88
73. Tomohon	67,65	84,56	76,70
74. Kotamobagu	64,48	74,98	68,75
Sulawesi Utara	68,78	75,44	71,98

TABEL 3.5
ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SD MENURUT KABUPATEN/KOTA
DAN JENIS KELAMIN, 2014

Kabupaten/Kota	SD		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Bolaang Mongondow	100,10	103,66	101,68
02. Minahasa	119,28	105,62	112,33
03. Kep. Sangihe	114,91	106,98	110,88
04. Kep. Talaud	110,25	105,21	107,72
05. Minahasa Selatan	109,48	101,76	105,59
06. Minahasa Utara	103,44	112,06	107,12
07. Bolaang Mongondow Utara	100,38	109,91	104,67
08. Kep. Siau Tagulandang Biaro	108,37	110,34	109,21
09. Minahasa Tenggara	105,03	109,12	106,98
10. Bolaang Mongondow Selatan	108,14	112,89	110,29
11. Bolaang Mongondow Timur	106,90	118,98	112,06
71. Manado	109,20	119,47	114,10
72. Bitung	110,96	104,46	107,78
73. Tomohon	115,22	110,97	113,16
74. Kotamobagu	106,31	109,05	107,73
Sulawesi Utara	108,51	109,24	108,86

TABEL 3.6
ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMP MENURUT
KABUPATEN/KOTA DAN JENIS KELAMIN, 2014

Kabupaten/Kota	SMP		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Bolaang Mongondow	106,71	94,01	100,15
02. Minahasa	70,56	83,11	77,15
03. Kep. Sangihe	80,32	104,17	91,10
04. Kep. Talaud	87,86	72,62	81,24
05. Minahasa Selatan	87,11	118,51	102,34
06. Minahasa Utara	74,15	84,01	78,85
07. Bolaang Mongondow Utara	95,07	101,92	98,47
08. Kep. Siau Tagulandang Biaro	71,56	69,68	70,80
09. Minahasa Tenggara	78,01	96,54	86,49
10. Bolaang Mongondow Selatan	88,73	89,29	89,04
11. Bolaang Mongondow Timur	80,34	83,58	82,08
71. Manado	84,55	89,92	86,92
72. Bitung	94,10	91,24	92,66
73. Tomohon	78,24	95,59	84,54
74. Kotamobagu	79,68	86,18	82,94
Sulawesi Utara	84,34	91,35	87,70

TABEL 3.7
ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMA MENURUT
KABUPATEN/KOTA DAN JENIS KELAMIN, 2014

Kabupaten/Kota	SMA		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Bolaang Mongondow	57,54	87,73	69,67
02. Minahasa	87,41	91,61	89,31
03. Kep. Sangihe	83,89	87,36	85,41
04. Kep. Talaud	120,70	154,89	134,56
05. Minahasa Selatan	82,90	90,72	86,76
06. Minahasa Utara	101,88	67,10	84,29
07. Bolaang Mongondow Utara	85,70	76,66	80,58
08. Kep. Siau Tagulandang Biaro	87,82	104,26	96,46
09. Minahasa Tenggara	91,87	105,48	98,47
10. Bolaang Mongondow Selatan	61,61	67,85	63,91
11. Bolaang Mongondow Timur	75,69	93,94	84,09
71. Manado	94,08	71,29	81,67
72. Bitung	60,05	89,02	74,77
73. Tomohon	77,68	77,34	77,50
74. Kotamobagu	75,59	92,48	82,46
Sulawesi Utara	82,20	84,87	83,48

TABEL 3.8
ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SD MENURUT KABUPATEN/KOTA
DAN JENIS KELAMIN, 2014

Kabupaten/Kota	SD		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Bolaang Mongondow	90,75	90,56	90,67
02. Minahasa	97,04	94,03	95,51
03. Kep. Sangihe	94,12	89,04	91,54
04. Kep. Talaud	100,00	98,08	99,04
05. Minahasa Selatan	92,28	84,39	88,31
06. Minahasa Utara	92,48	94,78	93,46
07. Bolaang Mongondow Utara	91,75	92,76	92,20
08. Kep. Siau Tagulandang Biaro	100,00	92,81	96,92
09. Minahasa Tenggara	93,85	95,76	94,76
10. Bolaang Mongondow Selatan	96,34	99,45	97,75
11. Bolaang Mongondow Timur	97,78	100,00	98,73
71. Manado	93,01	92,02	92,54
72. Bitung	94,31	87,69	91,07
73. Tomohon	99,04	97,18	98,14
74. Kotamobagu	94,99	93,97	94,46
Sulawesi Utara	94,31	92,45	93,42

TABEL 3.9
ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SMP MENURUT
KABUPATEN/KOTA DAN JENIS KELAMIN, 2014

Kabupaten/Kota	SMP		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Bolaang Mongondow	79,45	73,64	76,45
02. Minahasa	65,93	73,73	70,03
03. Kep. Sangihe	68,92	81,06	74,41
04. Kep. Talaud	83,84	67,96	76,93
05. Minahasa Selatan	68,27	80,57	74,23
06. Minahasa Utara	57,34	74,21	65,39
07. Bolaang Mongondow Utara	71,12	84,66	77,84
08. Kep. Siau Tagulandang Biaro	69,22	53,49	62,85
09. Minahasa Tenggara	60,16	75,72	67,28
10. Bolaang Mongondow Selatan	66,19	73,63	70,27
11. Bolaang Mongondow Timur	71,20	79,71	75,77
71. Manado	72,70	70,96	71,93
72. Bitung	82,58	66,04	74,25
73. Tomohon	77,32	85,00	80,11
74. Kotamobagu	66,57	68,12	67,34
Sulawesi Utara	71,15	73,60	72,32

TABEL 3.10
ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SMA MENURUT
KABUPATEN/KOTA DAN JENIS KELAMIN, 2014

Kabupaten/Kota	SMA		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Bolaang Mongondow	48,28	61,00	53,39
02. Minahasa	65,21	59,29	62,53
03. Kep. Sangihe	64,81	69,01	66,64
04. Kep. Talaud	88,74	83,44	86,59
05. Minahasa Selatan	65,73	75,44	70,53
06. Minahasa Utara	63,83	51,15	57,41
07. Bolaang Mongondow Utara	63,42	67,51	65,74
08. Kep. Siau Tagulandang Biaro	67,52	69,13	68,36
09. Minahasa Tenggara	60,78	72,79	66,60
10. Bolaang Mongondow Selatan	48,10	54,43	50,44
11. Bolaang Mongondow Timur	49,67	68,77	58,46
71. Manado	70,34	56,22	62,65
72. Bitung	47,77	56,03	51,97
73. Tomohon	55,08	65,62	60,72
74. Kotamobagu	58,47	69,10	62,79
Sulawesi Utara	61,32	62,08	61,69

TABEL 4.1
DISTRIBUSI PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN MENURUT
KELOMPOK BARANG DAN GOLONGAN PENGELUARAN PER KAPITA
SEBULAN PROVINSI SULAWESI UTARA, 2014

JENIS PENGELUARAN	Bersambung				
	Golongan Pengeluaran Per Kapita (Rp)				
	<100.000	100.000 - 149.999	150.000 - 199.999	200.000 - 299.999	300.000 - 499.999
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Makanan					
Padi – Padian	-	27,21	23,53	18,71	14,27
Ubi – Ubian	-	0,62	2,31	1,45	1,22
Ikan	-	7,81	11,99	10,86	10,69
Daging	-	0,00	0,00	0,47	0,97
Telur dan Susu	-	1,80	1,31	2,37	2,89
Sayur-Sayuran	-	7,81	7,82	8,16	7,18
Kacang-Kacangan	-	0,16	0,91	0,90	0,80
Buah-Buahan	-	3,21	2,23	3,46	3,43
Minyak dan Lemak	-	4,51	3,39	3,37	3,13
Bahan Minuman	-	4,43	4,07	3,34	2,75
Bumbu-Bumbuan	-	0,79	1,02	1,20	1,22
Konsumsi Lainnya	-	0,40	0,72	0,96	0,85
Makanan dan Minuman	-	4,81	4,46	6,56	8,61
Minuman Alkohol	-	0,00	0,15	0,34	0,34
Tembakau dan Sirih	-	6,99	6,30	7,36	7,54
Total Makanan	-	70,54	70,21	69,50	65,90
B. Bukan Makanan					
Perumahan	-	18,05	15,30	16,60	17,81
Aneka Barang & Jasa	-	8,22	8,20	8,10	9,24
Biaya Pendidikan	-	1,13	2,15	1,67	1,66
Biaya Kesehatan	-	0,84	2,02	1,69	1,60
Pakaian dan Alas Kaki	-	0,90	1,83	1,53	2,22
Barang Tahan Lama	-	0,08	0,05	0,22	0,49
Pajak dan Asuransi	-	0,21	0,17	0,40	0,49
Keperluan Pesta	-	0,03	0,08	0,28	0,59
Total Bukan Makanan	-	29,46	29,79	30,50	34,10
Rata-Rata Pengeluaran Sebulan	-	100,00	100,00	100,00	100,00

TABEL 4.1
DISTRIBUSI PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN MENURUT
KELOMPOK BARANG DAN GOLONGAN PENGELUARAN PER KAPITA
SEBULAN PROVINSI SULAWESI UTARA, 2014

Sambungan

JENIS PENGELUARAN	Golongan Pengeluaran Per Kapita (Rp)			Rata - rata
	500.000 - 749.999	750.000 - 999.999	1.000.000 atau lebih	
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. Makanan				
Padi – Padian	11,53	9,51	5,15	8,66
Ubi – Ubian	0,83	0,77	0,41	0,69
Ikan	8,97	7,73	4,68	6,89
Daging	1,23	1,53	1,57	1,37
Telur dan Susu	2,92	3,31	3,19	3,08
Sayur-Sayuran	5,45	4,99	2,71	4,33
Kacang-Kacangan	0,78	0,74	0,46	0,61
Buah-Buahan	2,85	2,83	2,52	2,78
Minyak dan Lemak	2,23	1,99	1,12	1,80
Bahan Minuman	2,44	2,15	1,28	1,88
Bumbu-Bumbuan	0,82	0,78	0,47	0,70
Konsumsi Lainnya	0,87	0,76	0,52	0,67
Makanan dan Minuman	8,87	10,24	12,80	10,97
Minuman Alkohol	0,30	0,33	0,29	0,31
Tembakau dan Sirih	7,10	6,79	4,37	5,69
Total Makanan	57,19	54,45	41,53	50,44
B. Bukan Makanan				
Perumahan	21,27	22,51	22,90	21,56
Aneka Barang & Jasa	11,47	11,73	15,44	13,11
Biaya Pendidikan	2,40	1,96	3,72	2,90
Biaya Kesehatan	1,85	2,63	3,04	2,54
Pakaian dan Alas Kaki	3,15	3,23	4,20	3,50
Barang Tahan Lama	0,98	1,29	3,92	2,46
Pajak dan Asuransi	0,86	0,98	2,10	1,45
Keperluan Pesta	0,82	1,21	3,16	2,04
Total Bukan Makanan	42,81	45,55	58,47	49,56
Rata-Rata Pengeluaran Sebulan	100,00	100,00	100,00	100,00

TABEL 5.1
PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT KABUPATEN/KOTA DAN
STATUS PENGUASAAN BANGUNAN TEMPAT TINGGAL, 2014

Kabupaten/Kota	Status Penguasaan Tempat Tinggal							Jumlah
	Milik sendiri	Kontrak	Sewa	Bebas Sewa		Dinas	Lainnya	
				Milik Org Lain	Milik Org Tua/Saudara			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01. Bolaang Mongondow	90,38	0,00	0,17	1,31	7,80	0,35	0,00	100,00
02. Minahasa	69,73	1,94	5,86	4,25	16,70	1,51	0,00	100,00
03. Kep. Sangihe	87,15	0,57	0,00	0,73	8,59	2,96	0,00	100,00
04. Kep. Talaud	92,11	0,61	0,13	0,87	4,96	1,17	0,16	100,00
05. Minahasa Selatan	81,31	0,14	0,28	3,23	13,96	0,59	0,49	100,00
06. Minahasa Utara	70,50	2,85	0,56	6,69	17,30	2,10	0,00	100,00
07. Bolaang Mongondow Utara	94,67	0,23	0,00	0,74	4,25	0,10	0,00	100,00
08. Kep. Siau Tagulandang Biaro	96,09	0,00	0,52	0,86	2,52	0,00	0,00	100,00
09. Minahasa Tenggara	87,77	0,22	1,17	0,93	9,42	0,49	0,00	100,00
10. Bolaang Mongondow Selatan	86,55	0,00	0,00	3,16	9,51	0,78	0,00	100,00
11. Bolaang Mongondow Timur	87,55	0,67	0,66	2,80	7,71	0,61	0,00	100,00
71. Manado	51,59	3,10	11,19	4,18	24,41	3,86	1,67	100,00
72. Bitung	68,54	3,76	4,36	4,81	16,93	1,61	0,00	100,00
73. Tomohon	63,83	0,74	7,34	2,38	25,23	0,18	0,29	100,00
74. Kotamobagu	86,99	1,21	2,16	0,92	7,67	1,04	0,00	100,00
Sulawesi Utara	74,60	1,57	3,89	3,16	14,76	1,64	0,38	100,00

TABEL 5.2
PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT KABUPATEN/KOTA DAN
LUAS LANTAI, 2014

Kabupaten/Kota	Luas Lantai					Jumlah
	<20	20-49	50-99	100-149	150+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Bolaang Mongondow	1,60	56,90	35,42	4,82	1,25	100,00
02. Minahasa	7,76	40,31	35,04	11,45	5,44	100,00
03. Kep. Sangihe	0,85	54,78	36,57	5,01	2,79	100,00
04. Kep. Talaud	1,61	40,66	42,94	10,38	4,40	100,00
05. Minahasa Selatan	1,64	57,35	32,77	6,06	2,18	100,00
06. Minahasa Utara	2,58	53,66	28,19	7,97	7,59	100,00
07. Bolaang Mongondow Utara	4,11	59,51	30,55	4,18	1,65	100,00
08. Kep. Siau Tagulandang Biaro	2,09	37,88	46,38	10,09	3,55	100,00
09. Minahasa Tenggara	3,07	46,68	39,11	7,49	3,64	100,00
10. Bolaang Mongondow Selatan	3,24	53,56	35,44	5,13	2,64	100,00
11. Bolaang Mongondow Timur	0,97	59,49	29,13	8,21	2,19	100,00
71. Manado	8,87	47,57	24,23	8,22	11,12	100,00
72. Bitung	4,37	42,03	29,09	12,54	11,97	100,00
73. Tomohon	8,32	35,76	37,99	11,74	6,19	100,00
74. Kotamobagu	3,19	34,50	41,92	11,14	9,25	100,00
Sulawesi Utara	4,66	47,86	32,82	8,52	6,15	100,00

TABEL 5.3
PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT KABUPATEN/KOTA DAN
JENIS ATAP TERLUAS, 2014

Kabupaten/Kota	Jenis Atap Terluas							Jumlah
	Beton	Genteng	Sirap	Seng	Asbes	Ijuk/ rumbia	Lain- nya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01. Bolaang Mongondow	1,54	3,20	0,00	89,76	0,65	4,61	0,24	100,00
02. Minahasa	2,31	0,20	0,00	95,44	1,79	0,10	0,16	100,00
03. Kep. Sangihe	0,98	0,18	0,00	94,91	0,39	3,54	0,00	100,00
04. Kep. Talaud	3,53	0,80	0,23	94,14	0,29	1,03	0,00	100,00
05. Minahasa Selatan	2,63	0,00	0,22	96,38	0,00	0,62	0,16	100,00
06. Minahasa Utara	1,33	0,00	0,42	96,55	0,00	1,47	0,23	100,00
07. Bolaang Mongondow Utara	1,75	2,06	0,00	76,87	0,00	19,32	0,00	100,00
08. Kep. Siau Tagulandang Biaro	3,04	0,00	0,13	96,82	0,00	0,00	0,00	100,00
09. Minahasa Tenggara	1,60	0,23	0,44	90,25	0,00	7,09	0,39	100,00
10. Bolaang Mongondow Selatan	2,47	0,82	0,00	84,96	0,57	10,98	0,20	100,00
11. Bolaang Mongondow Timur	4,33	6,10	0,00	83,52	0,00	6,04	0,00	100,00
71. Manado	2,49	0,68	0,37	95,42	0,21	0,61	0,23	100,00
72. Bitung	5,91	0,41	0,53	92,64	0,41	0,11	0,00	100,00
73. Tomohon	1,83	1,45	0,00	71,11	25,16	0,00	0,45	100,00
74. Kotamobagu	3,22	1,30	0,00	94,55	0,00	0,93	0,00	100,00
Sulawesi Utara	2,54	0,90	0,20	92,38	1,51	2,31	0,16	100,00

TABEL 5.4
PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT KABUPATEN/KOTA DAN
JENIS LANTAI TERLUAS, 2014

Kabupaten/Kota	Jenis Lantai				Jumlah
	Bukan tanah/ Kayu	Kayu	Tanah	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)
01. Bolaang Mongondow	92,98	4,04	2,85	0,13	100,00
02. Minahasa	80,39	14,85	4,75	0,00	100,00
03. Kep. Sangihe	90,27	1,28	8,16	0,29	100,00
04. Kep. Talaud	94,48	0,63	4,63	0,26	100,00
05. Minahasa Selatan	70,70	22,34	6,05	0,41	100,00
06. Minahasa Utara	88,04	2,99	8,82	0,15	100,00
07. Bolaang Mongondow Utara	82,06	14,88	2,87	0,20	100,00
08. Kep. Siau Tagulandang Biaro	94,34	1,40	4,26	0,00	100,00
09. Minahasa Tenggara	78,68	16,94	4,39	0,00	100,00
10. Bolaang Mongondow Selatan	87,27	8,48	4,26	0,00	100,00
11. Bolaang Mongondow Timur	86,20	11,53	2,08	0,19	100,00
71. Manado	90,71	5,43	3,09	0,77	100,00
72. Bitung	97,99	0,38	1,49	0,14	100,00
73. Tomohon	81,49	13,88	4,33	0,29	100,00
74. Kotamobagu	97,79	0,68	1,53	0,00	100,00
Sulawesi Utara	87,19	8,27	4,28	0,27	100,00

TABEL 5.5
PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT KABUPATEN/KOTA DAN
JENIS DINDING TERLUAS, 2014

Kabupaten/Kota	Jenis Dinding Terluas				Jumlah
	Tembok	Kayu	Bambu	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Bolaang Mongondow	54,78	37,69	6,75	0,78	100,00
02. Minahasa	60,08	35,29	2,23	2,39	100,00
03. Kep. Sangihe	80,12	16,30	3,25	0,32	100,00
04. Kep. Talaud	72,67	25,98	1,04	0,30	100,00
05. Minahasa Selatan	45,17	50,53	3,33	0,97	100,00
06. Minahasa Utara	67,34	26,03	2,80	3,82	100,00
07. Bolaang Mongondow Utara	59,78	29,14	10,01	1,07	100,00
08. Kep. Siau Tagulandang Biaro	89,36	9,80	0,84	0,00	100,00
09. Minahasa Tenggara	60,70	35,75	2,09	1,46	100,00
10. Bolaang Mongondow Selatan	58,19	33,39	7,79	0,63	100,00
11. Bolaang Mongondow Timur	55,26	43,08	0,93	0,74	100,00
71. Manado	77,67	10,98	1,34	10,01	100,00
72. Bitung	77,73	15,77	1,10	5,39	100,00
73. Tomohon	72,05	23,20	2,20	2,55	100,00
74. Kotamobagu	83,13	13,49	1,55	1,82	100,00
Sulawesi Utara	67,32	26,42	2,80	3,47	100,00

TABEL 5.6
PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT KABUPATEN/KOTA DAN
FASILITAS TEMPAT BUANG AIR BESAR, 2014

Kabupaten/Kota	Fasilitas Tempat Buang Air Besar				Jumlah
	Sendiri	Bersama	Umum	Tidak Ada	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Bolaang Mongondow	57,95	10,34	1,22	30,50	100,00
02. Minahasa	75,57	19,48	2,34	2,61	100,00
03. Kep. Sangihe	74,10	7,33	6,48	12,09	100,00
04. Kep. Talaud	71,97	10,90	11,32	5,82	100,00
05. Minahasa Selatan	74,35	15,62	2,64	7,39	100,00
06. Minahasa Utara	76,10	13,51	1,43	8,95	100,00
07. Bolaang Mongondow Utara	38,42	18,51	16,54	26,53	100,00
08. Kep. Siau Tagulandang Biaro	88,84	3,44	1,18	6,54	100,00
09. Minahasa Tenggara	74,74	14,75	2,02	8,49	100,00
10. Bolaang Mongondow Selatan	31,91	6,40	7,14	54,55	100,00
11. Bolaang Mongondow Timur	53,20	8,56	4,08	34,17	100,00
71. Manado	68,76	28,55	0,60	2,09	100,00
72. Bitung	76,99	17,65	2,72	2,65	100,00
73. Tomohon	66,43	33,34	0,23	0,00	100,00
74. Kotamobagu	70,49	6,62	2,89	20,00	100,00
Sulawesi Utara	69,52	17,20	2,92	10,36	100,00

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://sulut.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI UTARA
Jl. 17 Agustus Manado, Sulawesi Utara
Telp : (0431) 847044 Fax : (0431) 862204
Email : bps7100@bps.go.id